

**TRANSPARANSI PADA REKRUTMEN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020  
(Studi Pada DPC PDI-Perjuangan, DPC Partai Gerindra dan DPC Partai  
Golkar)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARFIN ARI SAPUTRA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TRANSPARANSI PADA REKRUTMEN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 (STUDI PADA PDI-PERJUANGAN, DPC PARTAI GERINDRA DAN DPC PARTAI GOLKAR)**

**Studi Oleh**

**ARFIN ARI SAPUTRA**

Peran penting partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah yaitu fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan langkah awal dalam pengisian jabatan dalam struktur politik. Proses rekrutmen tersebut harus dilakukan secara transparan agar terciptanya syarat mutlak untuk pemerintahan yang efektif, efisien dan adil. Transparansi dalam rekrutmen politik berkewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen kepala daerah merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh setiap partai politik agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah transparansi pada proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan Indikator Transparansi Lalolo yaitu; Penyediaan informasi yang jelas, Kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan dan meningkatkan arus informasi. Hasil yang didapat bahwa partai belum menerapkan indikator transparansi. Harus ada evaluasi kembali dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah dengan menerapkan indikator transparansi kepada publik. Saran dari penelitian ini ialah menghimbau kepada Ketua DPC PDI-Perjuangan, DPC Partai Golkar dan DPC Partai Gerindra agar lebih memperhatikan kembali dalam proses rekrutmen calon kepala daerah di Kabupaten Pesawaran lebih transparansi lagi kepada publik.

**Kata kunci:** Transparansi, Rekrutmen, Calon Kepala Daerah dan Pilkada

## **ABSTRACT**

### **"TRANSPARENCY IN THE RECRUITMENT OF PROSPECTIVE REGENTS AND DEPUTY REGENTS OF PESAWARAN REGENCY IN 2020 (STUDY ON PDI-PERJUANGAN, DPC GERINDRA PARTY AND DPC GOLKAR PARTY)"**

**Study By**

**ARFIN ARI SAPUTRA**

The important role of political parties in the process of regional elections is their function as a means of political recruitment. The important role of political parties in the process of regional elections is their function as a means of political recruitment. The recruitment process must be carried out transparently in order to create absolute conditions for effective, efficient and fair government. Transparency in political recruitment is obliged to convey information (socialization) of each candidate openly to the public. The application of the principle of transparency in the recruitment process of regional heads is an effort that needs to be made by every political party in order to produce qualified regional heads. Based on this background, the problem that will be studied is transparency in the recruitment process for regent and deputy regent candidates in the 2020 Pesawaran Regency regional election. The research method used in this research is a qualitative research method. By using the Lalolo Transparency Indicator, namely; Provision of clear information, Ease of access to information, complaint mechanisms and improving the flow of information. The suggestion from this study is to appeal to the Chairman of the DPC PDI-Perjuangan, DPC Golkar Party and DPC Gerindra Party to pay more attention to the recruitment process of regional head candidates in Pesawaran Regency more transparency to the public.

**Keywords:** Transparency, Recruitment, Regional Head Candidates and Regional Elections

**TRANSPARANSI PADA REKRUTMEN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020  
(Studi Pada DPC PDI-Perjuangan, DPC Partai Gerindra dan DPC Partai  
Golkar)**

Oleh

**ARFIN ARI SAPUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **TRANSPARANSI PADA REKRUTMEN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
PESAWARAN TAHUN 2020 (Studi pada DPC PDI  
Perjuangan, DPC Partai Gerindra dan DPD Partai  
Golkar)**

Nama Mahasiswa : *Arfin Ari Saputra*

No Pokok Mahasiswa : **1616021033**

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



*[Signature]*  
**Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D**  
NIP. 19601010 198603 1 006

*[Signature]*  
**Budi Harjo, S.IP, M.IP**  
NIP. 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

*[Signature]*  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 19611218 198902 1 001

**PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

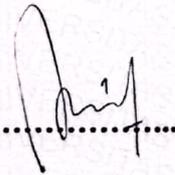
**Ketua : Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D**



**Sekretaris : Budi Harjo, S.IP, M.IP**



**Penguji Utama : Arizka Warganegara, S.IP, M.A, Ph.D**

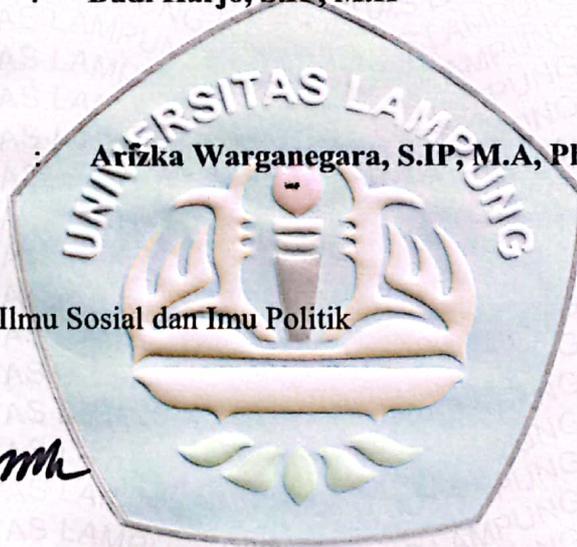


**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP.19610807 198703 2 001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfin Ari Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 1616021033

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Transparansi pada Rekrutmen Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020” adalah asli penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



**Arfin Ari Saputra**  
NPM. 1616021033

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Arfin Ari Saputra dilahirkan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pada 08 Mei 1998, anak sulung dari pasangan Bapak Alfian dan Ibu Risma rita. Penulis mengawali pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Falah Banjar Negeri pada tahun 2003 - 2004. Selanjutnya pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri2 Banjar Negeri pada tahun 2004-2010.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gedong Tataan pada tahun 2010-2013 dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gading Rejo pada tahun 2013 - 2016. Pada bulan Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (ILPEM), Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Pada semester tujuh penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kubuhitu, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Program Pengalaman Pembelajaran Lapangan (PPL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu.

## **MOTTO**

Sebab saya pernah dititik terendah dalam kegagalan, maka saya berhak dipuncak tertinggi dalam kesuksesan.

**(Arfin Ari Saputra)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirohim...*

Segala puji dan syukur atas rahmat yang diberikan Allah SWT serta Rasulullah Muhammad Saw,  
kupersembahkan pencapaian ini kepada:

**Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Alfian dan Ibu Risma rita)**

Terima kasih telah mendo'akanku disetiap langkahku.

**Saudara Kandungku Arbi Setiawan.**

Terimakasih sudah mensupport disetiap perjalanankuu.

**Keluarga Besarku (Nenek Masni'ah, Nenek Hamisah, Makwo Yustihanna, Abang Tiza, Mba Heni, Kak Tika, Riski.)**

Terima kasih selalu membantu disetiap prosesku.

**Sahabat-sahabat tercinta (Fajri, Adzan, Irham, Rendi, Yogi, Wanda, Awan, Yogi Dwika, Irfan)**

Terima kasih telah membantu dalam proses perjuangan ini.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "*Transparansi pada Rekrutmen Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020*" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D;.E.A.IPM,. selaku rektor Universitas Lampung.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Drs. R. sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D., selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan motivasi;
6. Arizka Warganegara, S.IP, M.A, Ph.D., selaku Dosen Pembahas atau Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Budi Harjo, S.IP, M.IP., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan dukungan, saran, dan nasihat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;

8. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah membantu mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, KPU Kabupaten Pesawaran, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran dan DPC Partai Golkar Kabupaten Pesawaran yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Keluarga seperjuanganku Angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi ini.
11. Serta Almater Kebanggaan Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku dan pengalaman hidup.
12. Semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan studi ini;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Penulis,

**Arfin Ari Saputra**  
NPM. 1616021033

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Transparansi .....	14
2.1.1 Prinsip Transparansi .....	16
2.1.2 Indikator Transparansi.....	17
2.2 Partai Politik.....	18
2.2.1 Fungsi Partai Politik .....	19
2.2.2 Tipologi Partai Politik .....	21
2.3 Rekrutmen Politik .....	22
2.3.1 Pola Rekrutmen Politik .....	23
2.4 Kerangka Pikir.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	34
3.4 Penentuan Informan .....	34

3.5	Data dan Sumber Data Penelitian.....	36
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6.1	Wawancara .....	38
3.6.2	Dokumentasi.....	40
3.6.3	Pengamatan (Observasi).....	40
3.7	Teknik Pengolahan Data .....	41
3.8	Analisis Data .....	42
3.9	Teknik Validasi Data.....	44
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>45</b>
4.1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) .....	45
4.1.1	Sejarah PDI-Perjuangan .....	46
4.1.2	Ideologi (Platform) PDI-Perjuangan .....	48
4.1.3	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan .....	49
4.1.4	Makna Lambang.....	50
4.1.5	Visi dan Misi PDI-Perjuangan.....	51
4.1.6	Asas PDI-Perjuangan .....	55
4.1.7	Tujuan PDI-Perjuangan.....	56
4.1.8	Jati Diri dan Watak PDI-Perjuangan .....	57
4.1.9	DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran .....	58
4.1.9.1	Lokasi.....	58
4.1.9.2	Kepengurusan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran.....	58
4.1.9.3	Tugas Pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran.....	59
4.1.9.4	Rencanaa Program Konsolidasi PDI- Perjuangan Kabupaten Pesawaran .....	60
4.1.9.5	Gambaran Umum tentang Proses Rekrutmen.....	60
4.1.9.6	Proses Terpilihnya Kandidat yang Berkualitas .....	61

4.2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	61
4.2.1	Sejarah Partai Gerindra	62
4.2.2	Ideologi (Platform) Partai Gerindra	62
4.2.3	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra	63
4.2.4	Makna Lambang	68
4.2.5	Visi dan Misi Partai Gerindra	69
4.2.6	Asas Partai Gerindra	70
4.2.7	Tujuan Partai Gerindra	70
4.2.8	Jati Diri dan Watak Partai Gerindra	71
4.2.9	DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran	71
4.2.9.1	Lokasi	71
4.2.9.2	Kepengurusasn DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran	72
4.2.9.3	Tugas Pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran	72
4.3	Partai Golongan Karya (Golkar)	73
4.3.1	Sejarah Partai Golkar	73
4.3.2	Ideologi (Platform) Partai Golkar	74
4.3.3	Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar	77
4.3.4	Makna Lambang	84
4.3.5	Visi dan Misi Partai Golkar	84
4.3.6	Asas Partai Golkar	85
4.3.7	Tujuan Partai Golkar	85
4.3.8	DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran	86
4.3.8.1	Lokasi	86
4.3.8.2	Kepengurusan DPC Partai Golkar Kabupaten Pesawaran	87
4.3.8.3	Tugas Pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran	87
4.3.8.4	Rencana Program Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Pesawaran	87
4.3.8.5	Gambaran Umum Tentang Proses Rekrutmen	88

<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>
5.1	Transparansi DPC PDI-Perjuangan, DPC Partai Gerindra dan DPC Partai Golkar .....	89
5.1.1	Penyediaan Informasi yang Jelas Tentang Prosedur-Prosedur, Biaya-Biaya dan Tanggung Jawab .....	91
5.1.1.1	Partai Menyediakan Informasi Seputar Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Mulai dari Tahap Penjaringan Hingga Penetapan Calon.....	92
5.1.1.2	Informasi yang Disediakan Partai dalam Proses Rekrutmen Calon Kepala Mulai dari Tahap Penjaringan hingga penetapan Calon.....	96
5.1.2	Kemudahan Akses Informasi dan Keterlibatan Masyarakat Konstituen dalam Setiap Tahapan .....	97
5.1.2.1	Keterbukaan Partai dalam Menyampaikan Informasi Seputar Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah.....	98
5.1.2.2	Cara Partai Menyampaikan Informasi Seputar Rekrutmen Calon Kepala Daerah Kepada Masyarakat.....	98
5.1.2.3	Syarat dan Mekanisme yang Ditentukan Partai untuk Masyarakat dapat Memperoleh Informasi Rekrutmen Calon Kepala Daerah.....	99
5.1.3	Mekanisme Pengaduan jika Ada Peraturan yang Dilanggar atau Permintaan untuk Membayar Uang Suap .....	99
5.1.3.1	Interaksi Partai dengan Masyarakat .....	100
5.1.3.2	Sarana Pengaduan Untuk Masyarakat .....	100
5.1.4	Meningkatkan Arus Informasi Melalui Kerja Sama dengan Media Massa dan Lembaga Non Pemerintah .....	102
5.1.5	Mengumumkan Proses dan Hasil Setiap Tahapan Rekrutmen Sampai dengan Penetapan Calon.....	102

<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
6.1 Kesimpulan.....	50
6.2 Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABLE**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Rekapitulasi Suara Partai Politik pada Pemilu 2019 oleh KPU (Sumber : nasional.tempo.co diakses pada 23 Desember 2019 .....)	7
2. Perolehan Kursi DPRD Pada Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Pesawaran (Sumber : teraslampung.com diakses pada 17 Juni 2020).....	8
3. Pengertian Transparansi Menurut Beberapa Ahli.....	15
4. Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.....	67
5. Susunan Kepengurusan Partai Golongan Karya .....	77

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir.....	30
2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	42
3. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan.....	50
4. Logo PDI-Perjuangan.....	50
5. Susunan Pengurus DPC PDI-Perjuangan Kab. Pesawaran .....	59
6. Lambang Partai Gerindra .....	68
7. Logo Partai Golongan Karya.....	84

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2005 adalah pertama kalinya pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia. Menurut Joko J. Prihatmoko pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Joko, 2005:3). Pilkada sebuah bentuk proses pencerminan prinsip demokrasi yang prosesnya melalui pemilihan oleh rakyat dengan memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik. Melalui Pilkada semakin memperluas partisipasi rakyat dalam proses politik. Rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan kepala daerah yang sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat pada umumnya.

Kegiatan pemilihan kepala daerah dalam prosesnya yang berperan aktif ialah partai politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan *sine quanon* (harus ada) dalam sistem demokrasi modern saat ini. Salah satu peran penting partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah yaitu fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan langkah awal dalam proses pengisian jabatan-jabatan tertentu dalam suatu struktur politik.

Rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff ialah fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas (Rush,2000:23). Dalam sebuah rekrutmen politik yang telah dilakukan akan lahir kader-kader yang akan menentukan daya jual partai politik itu sendiri di muka publik.

Rekrutmen partai politik lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Undang-undang tersebut, pasal 29 ayat 2 ditegaskan bahwa proses rekrutmen harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c (bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan. Makna demokratis sebagaimana disebutkan dalam proses rekrutmen politik yaitu berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan,keadilan, dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan proses rekrutmen politik secara terbuka artinya setiap orang yang mampu memenuhi syarat mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk bergabung dengan partai politik serta mengikuti pembinaan dan proses kaderisasi di internal partai.

Proses rekrutmen calon kepala daerah pada partai politik harus dilakukan secara transparan agar terciptanya suatu bentuk demokrasi, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon kepala daerah. Transparansi merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, partai politik sebagai organisasi publik sudah

seharusnya bersifat transparan, di mana setiap informasi mulai dari perumusan kebijakan, pengelolaan dana, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan keputusan yang ditetapkan oleh partai politik wajib disediakan untuk publik.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003:13). Transparansi partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional berasal dari penyumbang, maka informasi mengenai keuangan partai politik perlu diungkapkan kepada masyarakat (Permadi dan Riharjo, 2015: 6).

Transparansi dalam konteks rekrutmen politik ialah partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik agar dapat memperoleh dukungan dari masyarakat. Penerapan transparansi sangat diperlukan agar kinerja organisasi publik menjadi lebih baik, bersih dan berwibawa. Konsistensi penerapan prinsip transparansi akan memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan korupsi. Sehingga perwujudan organisasi yang bersih dan berwibawa di mata publik dapat terwujud (Asrida, 2012:31). Dengan diterapkannya prinsip transparansi dalam proses rekrutmen calon kepala daerah semakin mempermudah masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya.

Hampir setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung akan kembali menyelenggarakan kontestasi politik untuk menentukan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota melalui Pilkada tahun 2020. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang akan mengikuti Pilkada tahun 2020 bersama 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah,

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Way Kanan.

Pilkada Kabupaten Pesawaran yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020 mendatang membuat partai politik harus melakukan rekrutmen baik secara terbuka ataupun tertutup agar dapat mengikuti prosesi pemilihan pemimpin kepala daerah setiap 5 (lima) tahun sekali tersebut. Masing-masing partai politik memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Sistem rekrutmen yang digunakan biasanya dilaksanakan melalui seleksi, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus. Dengan sistem rekrutmen tersebut diharapkan setiap partai politik dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni serta benar-benar ahli dalam bidangnya.

Proses rekrutmen kepala daerah saat ini masih terbilang lemah, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi. Menurut data KPK, sejak tahun 2004-2019 tercatat sebanyak 124 kepala daerah di Indonesia setingkat Gubernur dan Walikota/Bupati terjerat kasus korupsi. Dari besaran angka kasus korupsi pada data tersebut, beberapa diantaranya adalah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah kabupaten yang ada di provinsi Lampung. Tercatat sejak tahun 2016 terdapat 5 (lima) kasus Bupati di Provinsi Lampung yang terjerat korupsi yaitu Agung Ilmu Mangkunegara Bupati Lampung Utara, Mustafa Bupati Lampung Tengah, Zainudin Hasan Bupati Lampung Selatan, Khamami Bupati Mesuji, dan Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/05564091/5-kepala-daerah-di-lampung-yang-dijerat-kpk>, Diakses 18 Desember 2019

Maraknya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat daerah di Provinsi Lampung tersebut harus menjadi pembelajaran bagi setiap partai politik di Kabupaten Pesawaran dalam menyeleksi, memilih, serta mengangkat calon Bupati dan wakil Bupati yang akan maju pada pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Lemahnya proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik akan menghasilkan kepala daerah yang tidak kompeten dalam memimpin suatu daerah dan bahkan cenderung melakukan korupsi.

Dalam ajang Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Pesawaran setiap partai politik akan berlomba-lomba mempersiapkan kader terbaiknya untuk dapat memenangkan kontetasi Pilkada tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan rekrutmen politik baik secara terbuka maupun tertutup. Menurut Bambang Tri Wahyudi selaku Sekretaris Penjaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, PDI Perjuangan membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka untuk umum. Pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga Pesawaran dan sekitarnya baik orang partai maupun *non* partai untuk mendaftarkan diri menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Para pendaftar yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati akan melewati beberapa proses seleksi mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon usungan partai.<sup>2</sup>

Menurut Yusak selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pesawaran, Partai Golkar membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka untuk umum yaitu warga Pesawaran dan yang di luar Pesawaran baik dari kader Partai Golkar maupun non kader. Dilakukannya penjaringan tersebut menindaklanjuti keputusan hasil rapat Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala

---

<sup>2</sup> <https://lampung.antaranews.com/berita/355468/pdi-perjuangan-pesawaran-buka-pendaftaran-pilkada-2020>, Diakses pada 18 Desember 2019.

Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. DPD Partai Golkar Pesawaran telah mematangkan rencana pelaksanaan penjurangan bakal calon Bupati/Wabup Pesawaran untuk Pilkada serentak 2020. Pelaksanaan Penjurangan tersebut akan dilakukan oleh Tim Penjurangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yg diketuai oleh Johnny Corne.<sup>3</sup>

Berbeda dengan PDI Perjuangan dan Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) justru tidak membuka penjurangan bakal calon kepala daerah. Menurut Mikdar Ilyas selaku Ketua Organisasi Kaderisasi dan keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra Lampung, Partai Gerindra tidak membuka penjurangan bakal calon kepala daerah seperti partai lainnya. Hanya melalui pendekatan komunikasi kepada kandidat calon kepala daerah di 8 (delapan) kabupaten/kota yang ingin maju di Pilkada 2020. Menurutnya dibuka atau tidak dibukanya penjurangan, calon yang sudah kelihatan namanya saat ini sudah ada yang mencoba melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan. Meski demikian, pihaknya terbuka pada semua kandidat untuk melakukan komunikasi.<sup>4</sup>

Beberapa waktu ini masih terlihat permasalahan yang terjadi pada proses rekrutmen calon kepala daerah yang di usung dari internal partai apakah memang lebih baik dibandingkan dengan calon dari eksternal partai, seperti partai Gerindra mengusung calon dari eksternal partai, serta PDI Perjuangan dan partai Golkar yang mendukung calon kepala daerah lebih mengedepankan internal partai pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2020. Terjadinya perbedaan pendukung calon pada masing-masing partai terutama pada partai Gerindra yang mendukung calon dari eksternal partai dikarenakan ketidakmampuan partai Gerindra dalam mengusung calon sendiri dari partainya.

---

<sup>3</sup> <https://netizenku.com/pilkada-2020-golkar-pesawaran-segera-laksanakan-penjaringan/>, Diakses pada 18 Desember 2019.

<sup>4</sup> <http://lampung.rilis.id/gerindra-jalin-komunikasi-calonkada>, Diakses pada 20 Desember 2019

Kelemahan dari proses rekrutmen yang menggunakan sistem tertutup ini syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi calon kepala daerah hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga masing-masing kepala daerah mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan pada partai politik. Seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau melalui media massa. Cara ini dapat menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan partai politik. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif, karena masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai secara terbuka tentang siapa kandidat dari partai politik, dan *track record* masing-masing kandidat bakal calon kepaladaerah.

PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar memang mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan ajang kontestasi politik dibanding partai-partai lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan suara partai pada Pemilu 2019 lalu. Berikut perolehan suara partai politik pada Pemilu 2019, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum:

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Persentase Jumlah Suara Sah
1	PDI-Perjuangan	27.053.961	19,33%
2	Partai Gerindra	17.594.839	12,57%
3	Partai Golkar	17.229.789	12,31%
4	PKB	13.570.097	9,69%
5	Partai Nasdem	12.661.798	9,05%
6	PKS	11.493.663	8,21%
7	Partai Demokrat	10.876.057	7,77%
8	PAN	9.572.623	6,84%
9	PPP	6.323.147	4,52%
10	Partai Perindo	3.738.320	2,67%
11	Partai Berkarya	2.929.495	2,09%
12	PSI	2.650.361	1,89%
13	Partai Hanura	2.161.507	1,54%
14	PBB	1.099.848	0,79%
15	Partai Garuda	702.536	0,50%
16	PKPI	312.775	0,22%

**Tabel 1 : Rekapitulasi Suara Partai Politik Pada Pemilu 2019 Oleh KPU(Sumber : nasional.tempo.co diakses pada 23 Desember 2019).**

Berdasarkan data diatas, PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar adalah 3 (tiga) partai politik dengan jumlah suara sah teratas pada Pemilu 2019. Selain itu, PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar juga memperoleh kursi yang cukup dominan untuk duduk sebagai anggota legislatif di Kabupaten Pesawaran. Berikut data perolehan kursi legislatif pada pemilu 2019 Kabupaten Pesawaran :

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9
2	Partai Gerakan Indonesi Raya	4
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai Kebangkitan Bangsa	5
5	Partai Nasional Demokrat	4
6	Partai Keadilan Sejahtera	4
7	Partai Demokrat	5
8	Partai Amanat Nasional	5
9	Partai Persatuan Pembangunan	2
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2

**Tabel 2 : Perolehan Kursi DPRD Pada Pemilu Legislatif 2019 Kabupaten Pesawaran (Sumber : Teraslampung.com diakses pada 17 juni 2020).**

Besarnya suara serta perolehan kursi yang diperoleh PDI Perjuangan, partai Gerindra dan partai Golkar pada Pemilu 2019 semakin memberikan peluang yang besar bagi partai-partai tersebut untuk memenangkan Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu, proses rekrutmen calon Bupati dan Wakil Bupati oleh PDI perjuangan, partai Gerindra, dan partai Golkar harus berjalan dengan baik dan transparan untuk dapat melahirkan calon-calon terbaiknya yang akan diusung maju pada Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Pesawaran.

Rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik menjadi penting karena proses tersebut merupakan langkah awal yang akan menentukan orang yang akan memimpin suatu daerah. Partai politik sebagai tempat bernaungnya para pemimpin rakyat diharapkan dapat menghadirkan kader-kader profesional yang mampu mengemban amanah rakyat. Penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen kepala daerah merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh setiap partai politik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Proses rekrutmen yang berkualitas akan melahirkan kepala daerah yang berkualitas pula.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian mengenai rekrutmen politik memang sudah banyak diteliti oleh peneliti lain. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari permasalahan, kerangka teori, serta studi kasus yang digunakan. Hal itu diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian rekrutmen politik yang diteliti oleh Oktanina Boru Sembiring Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Rekrutmen Politik Partai Gerakan Indonesia Raya”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa model rekrutmen yang digunakan oleh partai Gerindra dalam merekrut anggota baru yaitu rekrutmen terbuka. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh partai Gerindra dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan website serta melalui keaktifan kader partai Gerindra. Faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik partai Gerindra adalah dana, SDM anggota partai, anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, dan program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil. Proses kaderisasi guna menghasilkan kader partai yang berkualitas merupakan hal penting yang akan memudahkan dalam perekrutan calon pemimpin, hal itu bagian dari upayanya dalam meningkatkan SDM partai.
  
2. Penelitian rekrutmen politik yang diteliti oleh Muhamaad Reza Abdul Muthalib Tahun 2016 yang berjudul “Rekrutmen Politik Partai Golkar Dalam Penetapan Calon Bupati Gowa Periode 2015-2020”. Ringkasan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penting partai yang akan menentukan wajah partai diruang publik. Kualitas setiap anggota suatu partai menjadi petunjuk awal wajah politik partai diruang publik. Penelitian ini juga membahas tentang penetapan calon kepala daerah oleh partai politik belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan maupun AD/ART yang ada, dimana rekrutmen yang dilakukan masih berdasarkan kedekatan emosional (subjektif), Dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut menegaskan lebih mengoptimalkan sumber daya kader untuk menduduki kepala daerah, namun dalam hal ini partai Golkar belum bisa memberdayakan kader-kadernya yang sudah lama aktif tersebut.

3. Penelitian rekrutmen politik yang diteliti oleh Muhammad Ansar Anto Tahun 2015 yang berjudul “Pola Kaderisasi Sebagai Media Rekrutmen Partai Politik Di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pola kaderisasi anggota partai politik peserta pemilu 2014 di Kota Makassar pada dasarnya berbentuk pelatihan, pendidikan kader dan juga diskusi-diskusi tematik. Sistem rekrutmen kader partai politik peserta pemilu 2014 di Kota Makassar 2014 dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan melalui jalan rekrutmen dari internal partai dan juga eksternal partai untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di partai, penalonan anggota legislatif dan eksekutif. Sedangkan syarat kaderisasi tidak selamanya menjadi syarat yang mengikat dal proses rekrutmen partai politik.
  
4. Penelitian rekrutmen politik yang diteliti oleh Mustama Tahun 2016 yang berjudul “Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Pada Partai PAN Baubau”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa proses rekrutmen calon kepala daerah melalui partai PAN Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sudah berjalan dengan optimal dan sudah terpenuhi melalui tahapan-tahapan rekrutmen seperti penjangangan calon, penyaringan dan seleksi calon, hingga penetapan calon. Namun, ada beberapa faktor pengahambat yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut, yaitu (1) terjadinya perpecahan didalam partai itu sendiri dalam mengusung calon, dari ketidak kekompakan tersebut terjadilah dualisme karena adanya kepentingan di masing-masing pengurus, (2) Adanya penekanan dari wilayah untuk membuka penjangangan, (3) Dilihat dari gelar akademik, mempunyai kekayaan (finansial), mempunyai jabatan tinggi dari birokrasi (Indikator Topeng), (4) Dilihat dari kualitas pengalaman kerjanya, dan mempunyai prestasi pada masyarakat setempat dan sekitarnya (Indikator Kinerja). Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen calon kepala daerah Kota Baubau diatas namun ada faktor yang mendukungnya yaitu, (1) Dukungan pengurus partai amanat nasional yang dari DPD,

DPW, dan DPP, (2) Tim-tim dari pemenang dari luar yang mampu meyakinkan calon tersebut, (3) Tim seleksi melihat dari social backgroundnya calon yaitu dari keluarga yang mempunyai kemampuan untuk maju menjadi calon kepala daerah (finansial) dan dari keluarga elit, (4) Tim seleksi melihat calon dari seorang figure dalam birokrasi atau pemerintahan, (5) Bakal calon tersebut mempunyai motivasi untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau sehingga mempunyai visi- misi yaitu Kota Baubau menjadi daerah otonom di kawasan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Penelitian rekrutmen politik yang diteliti oleh Muhammad Rismawansyah Tahun 2017 yang berjudul “Pola Rekrutmen Bakal Calon Bupati PDI-P Pada Pilkada 2017 di Kabupaten Kolaka Utara”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan melakukan pola rekrutmen dengan terbuka dimana bakal calon ini berasal dari luar partai yang berarti non-kader yang di usung dengan melakukan *survey* di masyarakat kolaka utara dari hasil survey tersebut menempatkan nama Bobby Alimuddin dan Maksu Ramli dengan suara tertinggi dari tiga calon yang ada mendaftar di PDI Perjuangan. Sikap PDI Perjuangan dalam meminimalisir konflik sangat oligarki terhadap kader yang tidak menerima keputusan partai dalam Pilkada di Kolaka Utara, hal tersebut dapat dilihat dari pemberhentian saudara Ulfa Haeruddin sebagai anggota DPR kursi dan dipecat dari kader oleh DPP PDI-Perjuangan,

Haeruddin sebagai ketua DPC Kolaka Utara saat itu juga dipecat karena ikut dalam aksi di kantor DPD PDI Perjuangan di Kendari. Dan menunjuk saudara Musakkir Sarira sebagai ketua DPC PDI-Perjuangan sekaligus ketua DPRD Kolaka Utara.

Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas, pada penelitian ini penulis ingin melihat transparansi dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati pada

PDI Perjuangan, partai Gerindra, dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai transparansi pada proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat luasnya cakupan masalah yang menyangkut persoalan pada rekrutmen politik, maka penulis membatasi penelitian ini dengan persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan transparansi pada rekrutmen calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan, partai Gerindra dan partai Golkar Kabupaten Pesawaran Tahun 2020?
2. Apakah proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan, partai Gerindra dan partai Golkar Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 sudah sesuai dengan asas kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan transparansi pada rekrutmen calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan, partai Gerindra dan partai Golkar Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan, partai Gerindra dan partai Golkar Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai kajian akademis mengenai partai politik khususnya berkaitan dengan sistem rekrutmen politik yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan perihal masalah yang sama.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan evaluasi serta proyeksi kepada partai politik dan elite politik lokal dalam mempersiapkan calon pemimpin partai, daerah, maupun nasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Transparansi

Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah keterbukaan yang dilakukan oleh partai politik melalui kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui setiap tahapan-tahapan, serta syarat dan prosedur penyeleksian calon bupati dan wakil bupati oleh partai politik. Hal ini didasarkan padapendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

No.	Sumber / Ahli	Pengertian Transparansi
1.	Lalolo	Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses / kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003:13).
2.	Meutiah Ganie	Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik (Meutiah Ganie, 2000:151).
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik
4.	Permadi dan Riharjo	Transparansi partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional berasal

- dari penyumbang, maka informasi mengenai keuangan transparansi pertanggung jawaban keuangan mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan pemilihan umum bagi partai politik.
5. Hafild

**Tabel 3 : Pengertian Transparansi Menurut Beberapa Ahli.**

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan lembaga publik untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapatkan informasi yang akurat. Tujuan transparansi untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar.

Partai politik sebagai organisasi publik berkewajiban untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaannya, termasuk dalam proses penetapan calon kepala daerah. Penyeleksian calon kepala daerah pada partai politik harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar terciptanya suatu bentuk demokrasi, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon kepala daerah.

### 2.1.1 Prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 (enam) prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia dalam Rahmawati (2014) yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

Menurut Didjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana).
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Dari penjelasan diatas, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu adanya akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi secara detail mengenai sumbangan yang masuk ke partai politik baik sumbangan dari bakal calon yang akan diusung partai untuk maju dalam Pilkada maupun pihak lain, adanya laporan secara berkala mengenai pengelolaan keuangan PDI Perjuangan, partai Gerindra, dan partai Golkar Kabupaten Pesawaran. Penerapan prinsip transparansi oleh partai politik dapat menciptakan interaksi yang baik antara partai politik dengan masyarakat karena adanya ketersediaan informasi yang mudah diakses dan akurat yang berdampak pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tersebut.

### **2.1.2 Indikator Transparansi**

Lalolo (2003:15) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudahan akses informasi dan keterlibatan masyarakat konstituen dalam setiap tahapan.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan
- e. Mengumumkan proses dan hasil setiap tahapan rekrutmen sampai dengan penetapan calon

## 2.2 Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting dalam negara demokrasi. Partai politik menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara melalui penguasaan jabatan politik yang ada. Selain itu, partai politik merupakan sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiarjo, 2008:404), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah. Sedangkan menurut Gabriel Almond (Lili Romly, 2005:78) yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Definisi dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa partai politik mengemban peran dan tugas mulia dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dijalankan oleh partai politik hendaknya berorientasi pada kepentingan rakyat bukan pada golongan tertentu.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang berusaha menghimpun kekuatannya dari dukungan rakyat pemilih dan berusaha mendudukkan atau menempatkan anggotanya pada jabatan-jabatan politik untuk mempertahankan eksistensinya.

### **2.2.1 Fungsi Partai Politik**

Partai politik berkewajiban melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari partai politik yaitu fungsi rekrutmen. Rekrutmen politik memungkinkan terjadinya mobilitas dan rotasi politik. Menurut Budiarjo (2008:408) rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk kesejahteraan, menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Untuk memperjelas fungsi partai politik di Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa fungsi yaitu :

- a. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

- b. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Sarana partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.
- e. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Selain fungsi partai politik yang telah dijelaskan diatas, Dalton dan Martin P Wattenberg (Sigit Pamungkas, 2011:15-20) juga membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yaitu.

- a. Fungsi partai dielektorat pada bagian fungsi partai ini merujuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 (empat) fungsi yang masuk dalam fungsi partai dielektorat yaitu.
  1. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih.
  2. Pendidikan warga negara.
  3. Membagikan simbol indentifikasi dan loyalitas.
  4. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.
- b. Fungsi partai sebagai organisasi. Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses- proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat 4 (empat) fungsi yakni.
  1. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik.
  2. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi.
  3. Pengartikulasian kepentingan politik.

4. Pengagregasian kepentingan politik.
- c. Fungsi partai di pemerintahan. Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintah. Pada bagian ini terdapat 7 (tujuh) fungsi yakni.
1. Menciptakan mayoritas pemerintahan.
  2. Pengorganisasian pemerintah.
  3. Implementasi tuntutan kebijakan.
  4. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi.
  5. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah.
  6. Kontrol administrasi terhadap pemerintah.
  7. Memperkuat stabilitas pemerintahan.

### **2.2.2 Tipologi Partai Politik**

Partai politik sebagai elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki 2 (dua) tipologi yaitu berdasarkan kader dan berdasarkan massa. Tipologi tersebut hadir berdasarkan ideologi yang diwujudkan berdasarkan ide-ide perjuangan partai dan melalui program kerja partai yang ditawarkan oleh partai tersebut.

Struktur organisasinya, Peter Schroder dalam (Ramlan Surbakti, 1992:98) mengemukakan 3 (tiga) tipologi partai politik, yaitu :

- a. Partai Para Pemuka Masyarakat  
Partai ini berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suara mandat.

b. Partai Massa

Partai massa merupakan partai yang hadir dari kelas-kelas masyarakat yang sering termarjinalkan dari elit yang berada diluar parlemen yang berkeinginan untuk merebut kekuasaan atau sekedar memperjuangkan kepentingan golongannya didalam pemerintahan. Sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota, dengan tujuan utama mengumpulkan ekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan, mempengaruhi pemerintah masyarakat, serta mempertanyakan kekuasaan.

c. Partai Kader

Partai kader merupakan partai yang lahir dengan dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki intelektual diatas rata-rata sehingga melahirkan karakter partai yang eksklusif atau dominasi dari elit partai sangat kuat terutama dalam hal program dan elit partai ini sekaligus memperkuat program kerja partai dengan inovasi-inovasi baru yang hadir dari elit partai. Partai ini muncul sebagai partai jenis baru, mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas, mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus-menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan.

### 2.3 Rekrutmen Politik

Sebagai suatu organisasi, anggota adalah syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh suatu partai politik. Anggota suatu partai politik merupakan penggerak roda partai politik tersebut. Arah dan keberlangsungan suatu partai ditentukan oleh kualitas setiap anggotanya. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen. Rekrutmen dalam partai politik digunakan sebagai sarana untuk mendapat dukungan kekuasaan dari rakyat dengan cara mengajak rakyat untuk turut serta dalam keanggotaan suatu partai politik.

Lebih lanjut, Ramlan Surbakti (1992:118) menjelaskan bahwa rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya maka partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu sistem politik yang berkualitas, maka diperlukan proses rekrutmen politik yang berkualitas pula.

### 2.3.1 Pola Rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan hal penting yang menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan suatu partai politik. Tujuan suatu partai politik dapat dicapai apabila proses rekrutmen yang dilakukan partai berjalan dengan baik dan mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas. Proses rekrutmen suatu partai politik memiliki acuan waktu sendiri, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepemimpinan suatu partai. Dalam hal ini, setiap partai politik memiliki mekanismenya masing-masing yang sesuai dengan AD/ART dan kebijakan partai.

Menurut Syamsuddin Haris (2005:8), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni :

- a. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- b. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang dan elit tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
- c. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Mekanisme politik adalah bentuk, cara dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Menurut Czudnowski (Fadillah Putra, 2002:103), terdapat 2 (dua) model yang digunakan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu :

a. Rekrutmen Terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

b. Rekrutmen Tertutup

Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lili Romli, 2005:93) :

a. Partisan

Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. Contoh anggota partai yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.

b. *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Contoh orang yang direkrut dapat berasal dari aktivis ataupun LSM.

c. *Immediate Survival*

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Contoh orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai dapat dari kader internal maupun eksternal partai.

d. *Civil Service Reform*

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan internal sampai kepemimpinan nasional yang luas. Seleksi kepemimpinan yang dilakukan oleh partai politik dilakukan secara terencana dan teratur sesuai dengan prosedur masing-masing partai. Menurut Halking (2013:93), terdapat beberapa bentuk seleksi rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai, antara lain ialah :

a. *Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan*

Seleksi ini dilakukan berdasarkan survey, atau penilaian terhadap pengetahuan ataupun kemampuan calon dan kemudian diberikan training atau pelatihan lebih lanjut.

- b. Seleksi melalui penyortiran  
Seleksi ini digunakan untuk memperkuat kedudukan pemimpin politik. Contoh pemilihan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon telah ditentukan oleh partai politik.
- c. Seleksi melalui rotasi atau giliran  
Seleksi dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu berdasarkan usia atau jabatan. Misalnya pemilihan calon dari kader internal maupun eksternal partai berdasarkan keahlian yang dimiliki ataupun berdasarkan tingkatan jabatan.
- d. Seleksi dengan patronage  
Seleksi ini berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan emosional, suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Patronage masih memiliki keterkaitan dengan budaya korupsi. Misalnya pemimpin partai menunjuk atau memilih calon yang mempunyai modal besar dan atas dasar kedekatan.
- e. Seleksi melalui koopsi  
Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memilih dari anggota yang ada atau memasukkan orang-orang baru. Seleksi ini dilakukan dengan cara pemilihan pemimpin atau anggota dari kader ataupun non kader.

Rahat dan Hazan dalam Pamungkas (2011:99) mengemukakan ada 2 (dua) model dalam pengambilan keputusan dalam penetapan calon, yaitu :

#### I. Model Pemilihan

Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun penyeleksi dapat mengubah daftar komposisi.

#### II. Model penunjukan

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Untuk mencapai tujuan suatu sistem politik, diperlukan aktor-aktor berkualitas yang mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai pejabat politik dalam sistem politik dan pemerintahan. Disisi lain, kader berkualitas dari suatu partai politik yang berhasil menduduki suatu jabatan politik memberikan peluang yang lebih besar bagi partai politik tersebut untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, kader partai politik yang tidak mampu menjalankan perannya sebagai pejabat politik dengan baik maka akan merusak citra partai politik asalnya.

Apabila dicermati fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik saat ini belum mampu mengemban aspirasi masyarakat dalam menghantarkan figur-figur pembangunan yang berintegritas sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya partai politik demi kepentingan masyarakat, untuk menjembatani rakyat dan pemerintah dalam kegiatan pemerintahan.

Maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat pemerintahan menandakan masih banyaknya partai politik yang lemah dalam melaksanakan proses rekrutmen politik dan seleksi kandidat untuk menjadi elite politik di negeri ini. Integritas moral dan kompetensi politik calon wakil rakyat yang diharapkan menjadi pertimbangan saat seleksi justru diabaikan oleh partai politik. Disamping itu, popularitas dan uang mahar lah yang menjadi faktor penentu dalam proses seleksi tersebut.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Untuk mewujudkan struktur politik yang bertanggung jawab serta memperjuangkan kepentingan rakyat, tiap-tiap lembaga atau badan politik harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik sebagai organisasi publik diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam segala kegiatannya mulai dari perumusan, penetapan, hingga pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik.

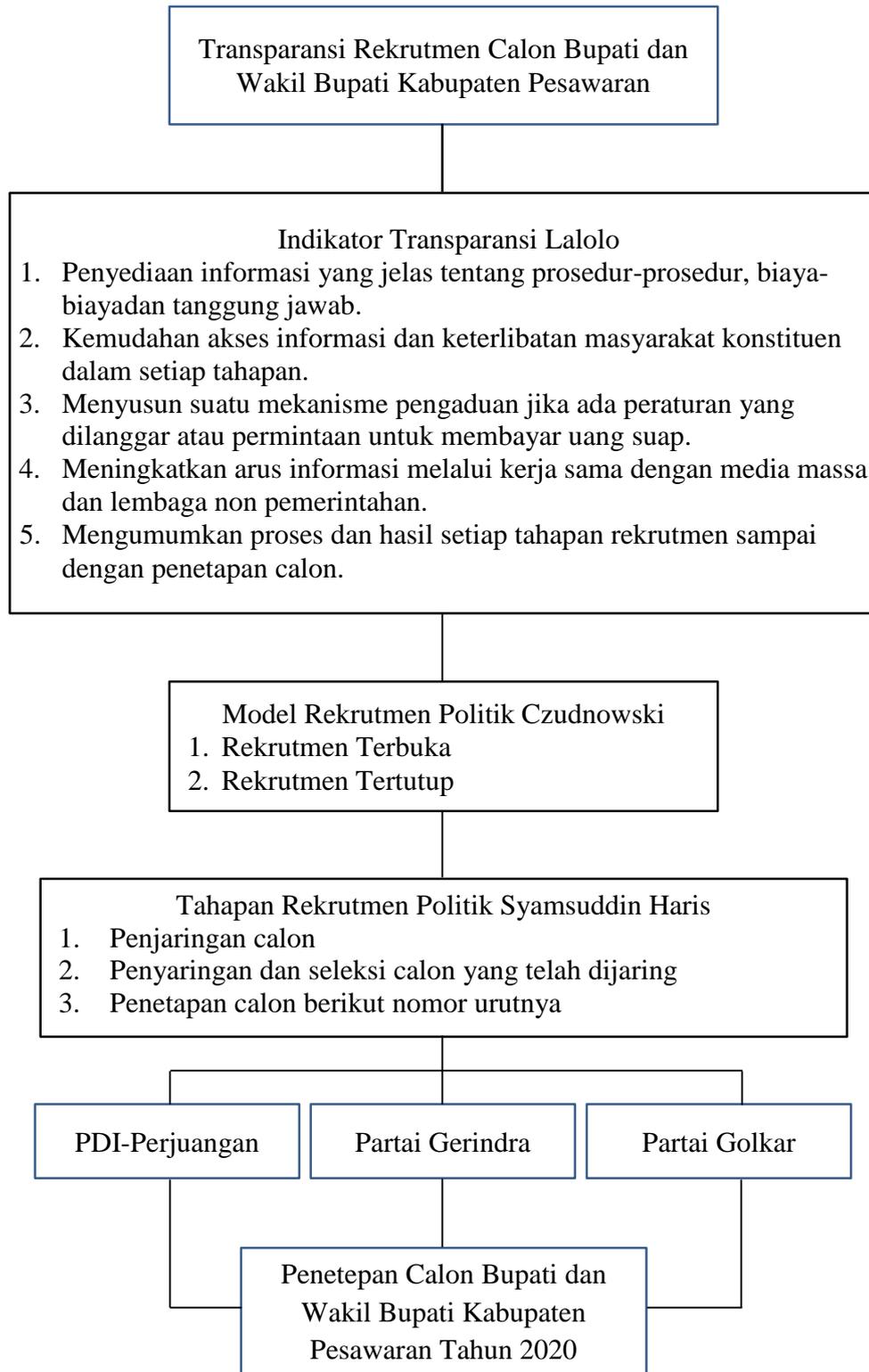
Dalam konteks pemilihan kepala daerah, peran penting rekrutmen politik oleh partai politik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam penyiapan calon kepala daerah, setiap partai politik biasanya memiliki proses rekrutmen yang berbeda-beda, tidak terkecuali yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan, DPC Partai Gerindra dan DPC Partai

Golkar Kabupaten Pesawaran Lampung. Hal tersebut terlihat dari mekanisme yang dilakukan partai dalam melakukan tahapan-tahapan rekrutmen. Terlepas dari itu, proses rekrutmen calon kepala daerah pada partai politik harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar terciptanya suatu bentuk demokrasi, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon kepala daerah. Untuk mengetahui sejauh mana partai politik menerapkan transparansi pada proses rekrutmen calon kepala daerah maka perlu dilakukan penelitian dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh penulis.

Rekrutmen calon kepala daerah menjadi penting karena proses tersebut merupakan tahap awal yang akan menentukan orang yang akan memimpin suatu daerah. Lemahnya proses rekrutmen akan berdampak pada lahirnya pejabat yang cenderung melakukan korupsi. Oleh karena itu, untuk terciptanya rekrutmen yang sehat dan kompetitif, diperlukan adanya pengawasan dari masyarakat secara langsung guna mengetahui setiap tahapan serta prosedur dalam proses rekrutmen tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin menggambarkan kerangka pikir mengenai transparansi pada proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :



**Gambar 1 : Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah mengungkap masalah yang berkenaan dengan pengalaman peneliti pada saat dihadapkan pada fenomena-fenomena yang dianggap tepat untuk menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara secara mendalam. Selain itu metode kualitatif juga sesuai untuk menambah wawasan mengenai sesuatu yang belum banyak diketahui. Metode kualitatif juga dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendapatkan hasil pemahaman yang sesuai dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan jalan keluar dalam melakukan pemecahan suatu masalah. Selain itu pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri hanya peneliti yang mampu melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada didalam kawasan tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan, dan salah satunya didasarkan pada penelitiannya.

Menurut Marshal dalam Sarwono (2006: 193) Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sedangkan menurut Masyuri dan Zainudin (2011:20), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan

menggunakan data empiris.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan secara mendetail dan terperinci mengenai fenomena sosial tertentu yang terdapat pada sekitarnya. Melalui penelitian deskriptif dapat dijelaskan secara mendalam tentang fenomena sosial yang sedang terjadi. Penelitian dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun dari fenomena lapangan yang bersifat empiris untuk menggambarkan hasil penelitian. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu.

Jenis penelitian ini menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana transparansi dalam proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati pada PDI Perjuangan, partai Gerindra, dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, maka penelitian ini menggunakan Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam fokus penelitian ini informasi yang terdapat dilapangan dapat dipilih sesuai dengan kajian permasalahan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengetahui transparansi transparansi dalam rekrutmen calon bupati dan wakil bupati pada PDI Perjuangan, partai Gerindra, dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran pada

Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dengan menggunakan indikator transparansi menurut Lalolo (2003:15), yaitu :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab

Partai politik memberikan dan menyediakan informasi tentang mekanisme rekrutmen politik serta rincian lainnya kepada masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut berupa penyediaan dan akses informasi secara jelas dan akurat mengenai prosedur-prosedur, biaya-biaya, serta tahapan-tahapan yang ada pada proses rekrutmen calon kepala daerah.

2. Kemudahan akses informasi

Pemberian informasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh partai politik dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui prosedur-prosedur, biaya-biaya, serta tahapan-tahapan yang ada pada proses rekrutmen calon kepala daerah secara langsung, sehingga proses rekrutmen tersebut berjalan dengan baik dan mampu untuk melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas. Dalam hal ini partai politik perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait proses rekrutmen calon kepala daerah kepada partai politik.

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Partai politik sebagai organisasi publik wajib membuat sarana pengaduan sebagai tempat yang secara khusus disediakan untuk menerima keluhan dari masyarakat. Pengaduan dan keluhan masyarakat terkait proses rekrutmen calon kepala daerah disampaikan kepada partai

politik melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh partai politik.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Partai menggunakan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi menggunakan teknologi sangat berguna karena jangkauan informasi teknologi sangat luas. Penggunaan teknologi juga efektif ketika penyebaran informasi terkendala jarak antara kantor partai dengan masyarakat yang jauh. Teknologi informasi dapat digunakan partai untuk penyebaran informasi dengan membuat website, twitter, facebook dan sebagainya. Dalam hal ini partai bekerja sama dengan media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait proses rekrutmen calon kepala daerah.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di DPC PDI Perjuangan, DPC Partai Gerindra, dan DPC Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kabupaten Pesawaran akan mengikuti pilkada serentak Tahun 2020. Maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah Kabupaten di Provinsi Lampung harus menjadi pembelajaran bagi setiap partai politik di Kabupaten Pesawaran dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah.

### **3.4 Penentuan Informan**

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:78). Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar

data atau informasi dapat diperolehnya (Bungin, 2007:107). Cara menentukan informan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Prosedur Purposive

Prosedur Purposive adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum didalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

2. Prosedur Kuota

Dalam prosedur kuota peneliti memutuskan saat merancang penelitian, berapa banyak orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan.

3. Prosedur Snowball

Prosedur bola salju (snowball) juga dikenal sebagai “rantai rujukan” atau juga prosedur networking, sering dianggap pula jenis prosedur purposif, namun berbeda. Dalam prosedur ini, dengan siapa peserta atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberi informasi kepada peneliti (Bungin, 2007:107-108).

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti sesuai kebutuhan penelitian. Informan ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Prosedur Purposive sebagai cara untuk menentukan informan. Berdasarkan hal tersebut adapun informan yang diwawancarai yaitu :

1. Ketua DPC PDI Perjuangan, DPC Partai Gerindra dan DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran.
2. Tim seleksi Calon Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran.
3. Calon Bupati atau Wakil Bupati dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran pada Pilkada 2020.
4. Tim Sukses Calon Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran.
5. Akademisi/LSM/Jurnalis

Pertimbangan pemilihan informan dalam penelitian ini menitikberatkan kepada pimpinan partai dan tim seleksi calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar karena pihak tersebut yang mengetahui aturan dan proses rekrutmen dari masing-masing partai, calon bupati dari masing-masing partai dan tim suksesnya selaku peserta rekrutmen, serta pengamat politik yang bersifat netral.

### **3.5 Jenis Data**

Menurut Riduwan dalam Siswanto (2012: 54), data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Menurut Siswanto (2012:56), data primer adalah data data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan alasan bahwa bentuk dan ciri penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dan

jumlah sampel berdasarkan kriteria yang diambil oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan alasan bahwa agar peneliti dapat mengetahui hal-hal lebih dalam mengenai fenomena atau situasi yang terjadi secara langsung oleh informan.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Bungin (2004:122) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa dokumen SK DPC PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar yang mana ketiganya membahas permasalahan mengenai penjurangan hingga penetapan calon kepala daerah dari masing-masing partai politik, pengumuman dari media massa yang berkaitan dengan proses perekrutan hingga penjurangan calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar tahun 2020, serta data-data yang berasal dari artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet, maupun di perpustakaan Unila, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar terkait dengan materi partai politik, AD/RT, Surat Keputusan, arsip-arsip serta literature lainnya yang berkaitan dan mendukung didalam penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti yang sedang mengadakan penelitian karena menyangkut bagaimana cara yang digunakan untuk memperoleh data. Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 3.6.1 Wawancara

Menurut Lexy J. Moeloeng (2010:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan dua pihak yakni pewawancara dengan terwawancara. Menurut Patton dalam Lexy J. Moeloeng (2010:187), wawancara dibagi menjadi tiga berdasarkan perencanaan pertanyaan, yakni wawancara pendekatan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara buku terbuka. Penelitian ini menggunakan wawancara jenis kedua, yakni wawancara terstruktur dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara akan memudahkan peneliti untuk mencapai ketiga tujuan penelitian yang telah ditetapkan diawal. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam ini tidak dilakukan secara ketat dan formal, hal ini dimaksudkan agar informasi yang dikumpulkan memiliki kedalaman yang cukup.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara kepada informan yang telah ditetapkan, dimana wawancara merupakan alat re- checking telah atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan yakni ketua, tim seleksi calon kepala daerah, bakal calon/calon bupati atau wakil bupati, tim sukses calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, serta akademisi/LSM/Jurnalis dimana akan diperoleh keterangan dari tujuan penelitian itu sendiri dengan menggunakan pedoman (guide/draft) wawancara serta beberapa topik yang telah disertakan oleh peneliti yang didiskusikan bersama-sama dengan peneliti dan informan Wawancara mendalam ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan Penelitian

Peneliti telah membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Pedoman wawancara antara lain berisi pertanyaan- pertanyaan mendasar yang berkembang didalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun kemudian ditujukan kepada yang lebih ahli untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing. Peneliti kemudian membuat perbaikan dan menyusun kembali daftar wawancara yang berisi pertanyaan untuk dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya.

Tahap selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang telah disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subyek penelitian selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan dari subyek wawancara. Peneliti selanjutnya mencari subyek yang sesuai dengan karakteristik subyek penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti telah menghubungi pihak-pihak yang akan di jadikan subyek didalam penelitian. Kemudian menanyakan mengenai kesiapan dan kesepakatan subyek dan melangsungkan proses wawancara

b. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Peneliti telah membuat kesepakatan dengan subyek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Setelah wawancara dilakukan maka peneliti memindahkan hasil wawancara tersebut kedalam bentuk tulisan.

### **3.6.2 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari lembaga instansi yang terkait. Dokumentasi Merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku, internet dan sumber lainnya yang diperlukan oleh peneliti. Dokumentasi tersebut menjadi sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Lexy J Moeloeng , 2010:216 ). Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi AD/ART PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar serta Peraturan-Peraturan yang diberlakukan Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar, dokumen tertulis, data statistik, laporan penelitian sebelumnya, dan tulisan-tulisan ilmiah tentang Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar.

### **3.6.3 Pengamatan (Observasi)**

Dalam melakukan observasi dalam penelitian ini, peneliti adalah melakukan pengamatan. Pengamatan dalam hal ini merupakan pengumpulan data yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti maupun informan dalam proses penelitian ini dan tahap pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh peneliti. Peneliti tidak masuk kedalam komunitas dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar melainkan hanya sebagai pengamat dilingkungan Partai yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono (2008), pengamatan dikenal tiga jenis metode yaitu yang pertama pengamatan biasa, kedua pengamatan terkendali dan pengamatan partisipatif/terlibat. Dalam penelitian ini observasi bertujuan untuk menarik inferensi tentang makna dan pemahaman yang tidak terucap (tacit understanding) yang tidak didapatkan baik

pada wawancara ataupun dokumentasi.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data atau disebut juga proses pra-analisis data (Sarwono, 2006:135). Peneliti pada penelitian ini memperoleh data dari lapangan sehingga penulis dituntut dalam melakukan pengolahan data yang telah terkumpul yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Editing**

Proses editing merupakan proses dimana penulis melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul (sarwono 2006:135). Tahapan ini digunakan untuk mengedit data-data yang masih terdapat kesalahan dalam penulisannya. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informan yang berupa data mentah yang berkaitan dengan proses rekrutmen calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 oleh PDI Perjuangan Partai Gerindra dan Partai Golkar dan berupa lampiran dalam skripsi ini.

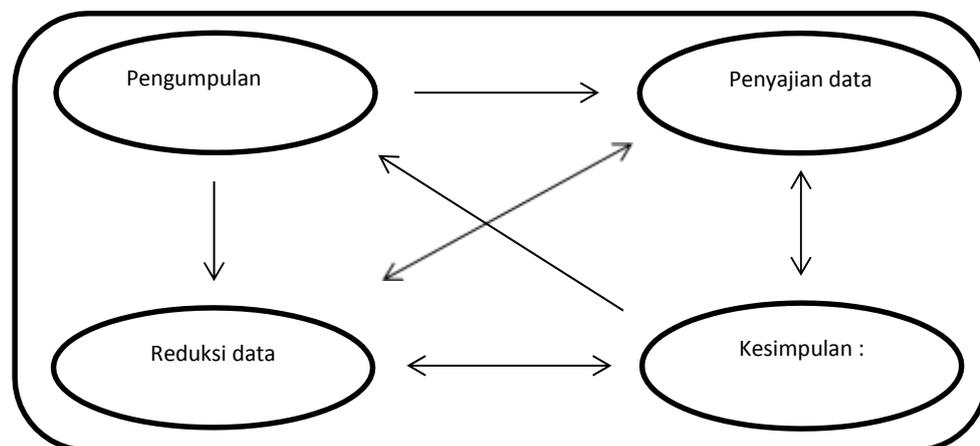
#### **2. Interpretasi Data**

Interpretasi data pada penelitian ini dengan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang ada tetapi data juga diinterpretasikan secara baik untuk mendapatkan sebuah kesimpulan hasil penelitian. Peneliti memberi penjabaran serta penjelasan dari berbagai data yang telah masuk dan melewati tahap editing. Interpretasi penulisan dilakukan oleh peneliti untuk menampilkan data yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat rahasia sehingga penulis memilah kata yang terbaik agar tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan berbagai pihak (Sugiyono, 2012:30).

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dengan bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut :



**Gambar 2 : Komponen-komponen analisis data model interaktif (Sumber : Miles dan Huberman, 2014 : 14).**

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing or Verification)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

### 3.9 Teknik Validasi Data

Pada teknik Pengolahan data peneliti akan melakukan proses triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi sumber data berusaha untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada diluar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama. Beberapa macam triangulasi data adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber, menggunakan sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) adalah partai politik di Indonesia. PDI-Perjuangan didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 atau 6 hari setelah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah fusi atau penggabungan dari tiga partai sekular: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

PNI sebagai partai bermassa terbesar dalam PDI-Perjuangan yang didirikan oleh Soekarno, mempunyai basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI di zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah bersebrangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965.

PDI-Perjuangan mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangan. Pada awal berdirinya PDI-Perjuangan pada tahun 1973 dipimpin oleh Mohammad Isnaeni. Dalam anggaran dasarnya PDI-Perjuangan memiliki tujuan yakni :

1. Tegaknya Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai negara kesatuan dan negara hukum yang demokratis.
2. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

3. Terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

PDI-Perjuangan menetapkan diri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan yang utuh bagi Indonesia. Bukan hanya kemerdekaan politik, tapi kemerdekaan ekonomi dan terus berjuang mempertahankan jati diri bangsa yang berbhineka dan tetap tak kehilangan akar tradisinya. Karena itu, bagi PDI-Perjuangan berada dalam satu gerbong perjuangan bersama rakyat adalah tanggung jawab sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Setiap kader dituntut memahami rakyat, menghimpun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan rakyat, mendidik dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik, menanamkan keyakinan atas kemampuan rakyat, mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerak politik, menggerakkan rakyat untuk berjuang bersama, dan mengawal kerja politik ideologis yang membumi.

#### **4.1.1 Sejarah PDI-Perjuangan**

Sejarah PDI-Perjuangan berawal dari penggabungan atau dari 5 partai politik (parpol). Fusi itu antara lain PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima partai politik berlangsung pada tanggal 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI-Perjuangan. Seiring perjalanan PDI-Perjuangan terus bongkar pasang dalam struktur pimpinan

Sejarah PDI-Perjuangan dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927. Hingga partai gabungan terbentuk kemudian dinamakan PDI. Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintahan. Untuk mengatasi konflik

tersebut, anak kedua dari Soekarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI. Namun, Pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2 sampai 6 Desember 1993 di Asmara Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketua DPP PDI periode 1993-1998. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure. Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarnoputri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Tanggal 15 Juli 1996 Pemerintahan Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua DPP PDI. Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Kemudian muncul rombongan berkaus merah Kubu Suryadi, dan terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan 27 Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Karena Pemerintahan Soeharto lengser pada Reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri semakin kuat dan ditetapkan sebagai Ketua DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar Bali. Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI-Perjuangan pada 1 Februari 1999

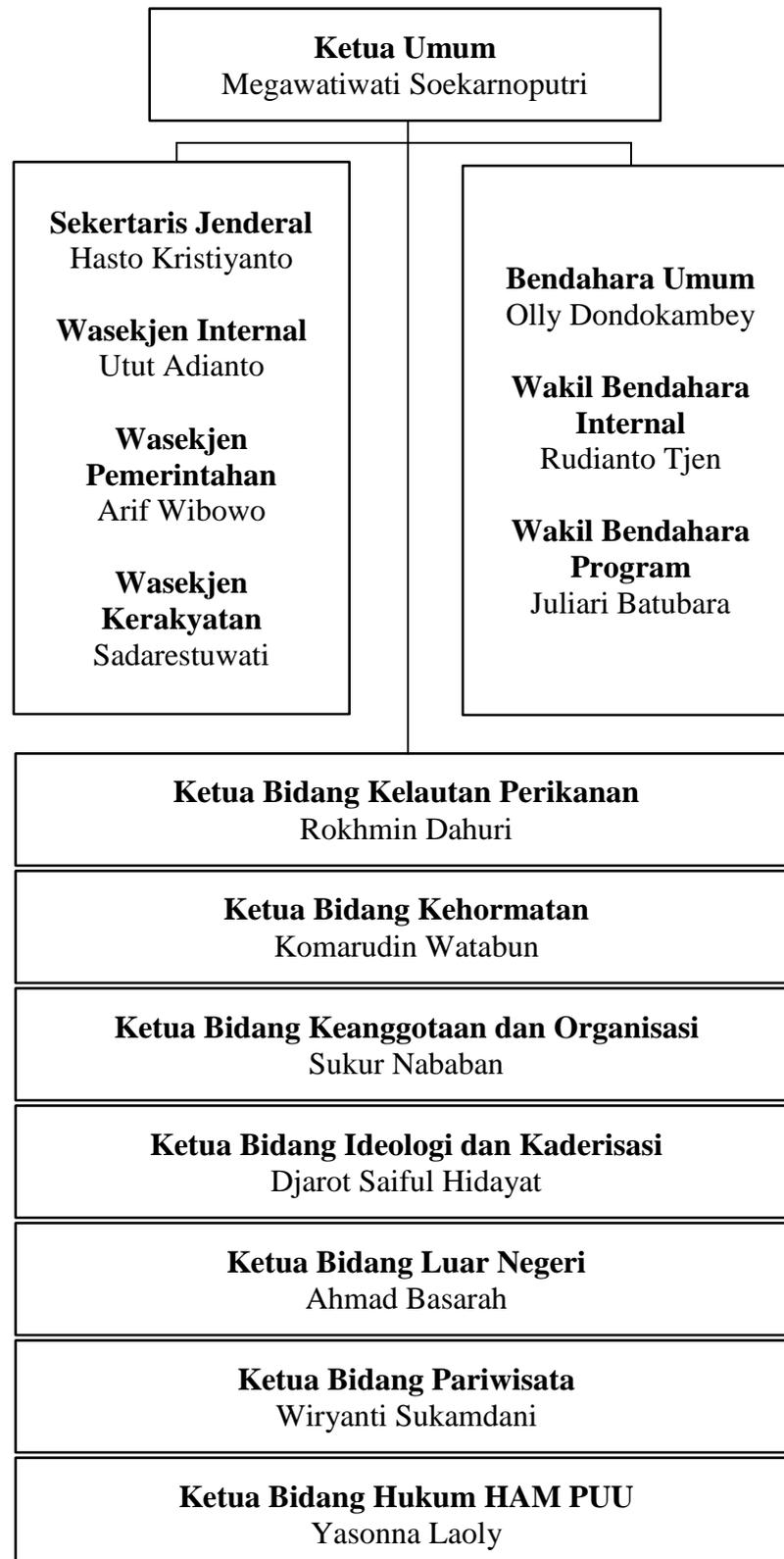
agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta. PDI-Perjuangan melakukan Kongres I pada 27 Maret 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan Keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDI-Perjuangan periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDI-Perjuangan di Bali pada 8 sampai 12 April 2015, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDI-Perjuangan periode 2015-2020.

#### **4.1.2 Ideologi (Platform) PDI-Perjuangan**

PDI-Perjuangan secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai di AD/ART sejak partai ini berdiri 1973. Di Kongres 2005, PDI-Perjuangan bahkan menetapkan diri sebagai partai ideologis. Maka bagi PDI-Perjuangan, Pancasila sudah menjadi komitmen politik bukan komitmen moral semata. Jejak PDI-Perjuangan jelas, ketika melalui salah satu kadernya, yaitu almarhum Taufiq Kiemas berhasil membuat program sosialisasi empat pilar.

Jauh sebelumnya, PDI-Perjuangan menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai kegiatan rutin tahunan dari pusat hingga ranting (Desa). Jadi, bagi PDI-Perjuangan dan para kadernya, Pancasila adalah ideologi yang hidup. Jejak PDI-Perjuangan yang lain adalah inisiatif aktif dalam kesabaran di balik upaya penetapan Keppres terkait Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 bersama elemen-elemen NU. Upaya yang didorong sejak zaman Presiden SBY ini akhirnya terwujud saat Pemerintahan Presiden Jokowi.

#### 4.1.3 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan



<b>Ketua Bidang Pemerintahan Hankam</b> Puan Maharani
<b>Ketua Bidang Pemenangan Pemilu</b> Bambang Wuryanto
<b>Ketua Bidang Kebudayaan</b> Tri Rismaharini
<b>Ketua Bidang Penanggulangan Bencana</b> Ribka Tjiptaning
<b>Ketua Bidang Industri Tenaga Kerja dan Jamsos</b> Nusyirwan Sudjono
<b>Ketua Bidang Pangan, Pertanian dan LH</b> I Made Urip
<b>Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan</b> Hamka Haq
<b>Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital</b> M. Pranada Prabowo

**Gambar 3 : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan (Sumber : <https://img.gesuri.id/> diakses 30 Oktober 2022).**

#### 4.1.4 Makna Lambang



**Gambar 4 : Logo PDI-Perjuangan (Sumber <https://pdi-perjuangan> diakses pada 31 Oktober 2022).**

1. Lambang PDI-Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
2. Warna Dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
4. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
5. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa putus.

#### 4.1.5 Visi dan Misi PDI-Perjuangan

##### a. Visi PDI-Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI-Perjuangan adalah :

1. Partai adalah alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Partai adalah alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Tuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme dan sosio demokrasi (Tri Sila).
3. Partai adalah alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
4. Partai adalah wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
5. Partai adalah wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam Misi PDI-Perjuangan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

##### b. Misi PDI-Perjuangan

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum :

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemoyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 partai mempunyai tujuan khusus :

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat dalam satu.
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9 partai mempunyai fungsi

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, lembaga politik dan lembaga publik.
3. Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
4. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara.
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 partai mempunyai tugas

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.

3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan beriwibawa.
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

#### **4.1.6 Asas PDI-Perjuangan**

Rumusan Asas PDI-Perjuangan diatur dalam Bab II Tentang Asas, Jati Diri dan Watak yang berbunyi :

1. Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
2. Jatidiri partai adalah kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.
3. Watak partai adalah gotong-royong, demokratis, merdeka

Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Azas partai adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945”. Sangat jelas pengertian hukum PDI-Perjuangan ialah Pancasila yang diakui secara resmi kenegaraan dan UUD 1945.

#### **4.1.7 Tujuan PDI-Perjuangan**

Partai mempunyai tujuan umum :

Tujuan Umum

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri diatas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

#### Tujuan Khusus

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pemubakaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

#### **4.1.8 Jati Diri dan Watak PDI-Perjuangan**

Jati diri dan watak PDI-Perjuangan tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH- 05.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasal 5 sebagai berikut :

1. Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
2. Jatidiri partai adalah kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.
3. Watak partai adalah gotong-royong, demokratis, merdeka.

#### **4.1.9 DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran**

##### **4.1.9.1 Lokasi**

DPC PDI-Perjuangan berlokasi di :

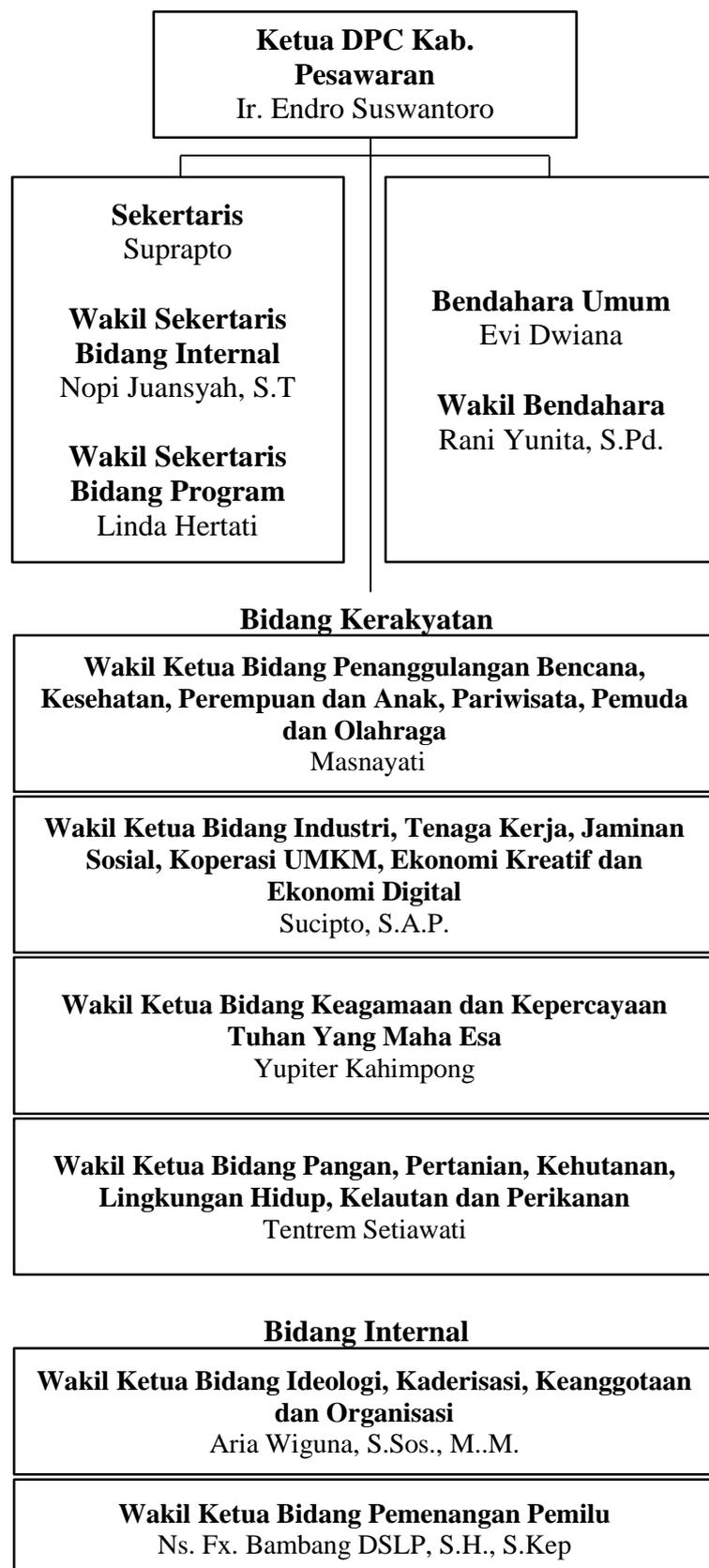
Jalan : Jl.Perjuangan

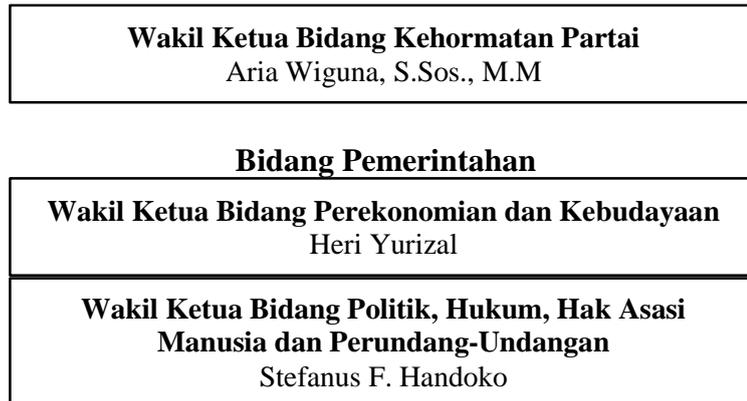
Dusun : Way Hui

Desa : Wiyono Kecamatan : Gedong Tataan

Kabupaten : Pesawaran.

#### 4.1.9.2 Kepengurusan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran





**Gambar 5 : Susunan Pengurus DPC PDI-Perjuangan Kab.Pesawaran (Sumber : <https://pdi-perjuangan-lampung.id> diakses pada 31 Oktober)**

#### **4.1.9.3 Tugas Pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran**

1. DPC Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP partai di Kabupaten/Kota.
2. Struktur dan komposisi pengurus DPC partai terdiri dari
  - a. Ketua.
  - b. Wakil-wakil ketua bidang
  - c. Sekretaris dan wakil sekretaris
  - d. Bendahara dan wakil bendahara.
3. Masa bakti DPC partai ad

#### **4.1.9.4 Rencana Program Konsolidasi PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran**

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Pesawaran menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) guna memperkuat konsolidasi tingkat kecamatan menjelang pemilu 2024 dalam penambahan kursi legislatif setempat. Ketua DPC PDI-Perjuangan

Pesawaran yakni Endro S. Yahman mengatakan “Musancab ini adalah kegiatan internal partai yang sangat special, karena merupakan konsolidasi tingkat kecamatan dalam menghadapi Pemilu 2024 untuk menambah jumlah kursi di legislatif,”. (<https://www.rmollampung.id/musancab-pdip-pesawaran-sebagai-penguatan-konsolidasi-jelang-pemilu-2024> diakses pada 31 Oktober 2022).

#### **4.1.9.5 Gambaran Umum tentang Proses Rekrutmen**

Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua mekanisme yang biasanya ditempuh oleh pengurus DPC PDI-Perjuangan pada level kabupaten, yaitu:

Pertama, merekrut bakal calon yang lebih diprioritaskan dari internal partai. Dalam mekanisme ini, DPC PDI-Perjuangan mengakomodasi kader partai yang menjadi pengurus partai, untuk direkrut sebagai bakal calon.

Kedua, proses rekrutmen secara terbuka, merekrut bakal calon dari eksternal partai. Dalam mekanisme ini, DPC PDI-Perjuangan mengakomodasi non kader partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk direkrut sebagai bakal calon, dengan melalui tahapan, penjaringan, penyaringan, penetapan calon dan pendaftaran calon yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis (Juknis).

#### **4.1.9.6 Proses Terpilihnya Kandidat yang Berkualitas**

Sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan bupati dan wakil bupati merupakan suatu mekanisme partai dalam menentukan kandidat partai yang berbasis elektoral. Dalam rangka ini, rekrutmen (pencalonan) politik adalah sebagai sarana merekrut dan menyeleksi masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui pemilu.

Pada umumnya terdapat dua sistem seleksi kandidat. Pertama, Inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (eligible). Jadi tidak ada keharusan menjadi anggota partai tersebut, ataupun kesamaan ideologi. Kedua, pola eksklusif (tertutup), terdapat jumlah syarat yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Misalnya, ada syarat khusus bagi kandidat yang ikut seleksi. Sebagai contoh, kader yang dapat diseleksi harus memenuhi syarat yakni 3 tahun berturut-turut menjadi anggota partai dan mempunyai visi dan misi sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai.

## 4.2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Awal mula Partai Gerindra berdiri melalui gagasan dari Fadli Zon dan Pengusaha Hasyim Djojohadikusumo. Menurut mereka, Indonesia saati itu tengah menghadapi bahaya kapitalisme yang merugikan rakyat ekonomi kelas bawah. Fadli Zon terinspirasi kata-kata Edmund Burke yaitu “The only thing necessary for the triumph (of evil) is for good men to do nothing”. Oleh karena itu, Fadli dan Hasyim merasa perlu melakukan sesuatu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kelas bawah dari jerat sistem kapitalisme ( Halaman “Sejarah Partai Gerindra” dalam [www.gerindra.or.id](http://www.gerindra.or.id)).

### 4.2.1 Sejarah Partai Gerindra

Pada Desember 2007, berkumpul sejumlah nama seperti Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Babihoe. Mereka berkumpul membicarakan Anggaran Dasar yang harus dipenuhi untuk pendirian sebuah partai. Hal ini memang mendesak mengingat pemilu yang akan diselenggarakan pada 6 Februari 2008. Lahirnya Partai Gerindra tidak lepas dari campur tangan Prabowo Subianto yang menjadi ketua dewan pembina partai tersebut. Prabowo ikut memasukan ide-ide yang termaktub dalam visi, misi dan manifesto perjuangan partai yang dideklarasikan saat Gerindra berdiri. Selain itu, Prabowo juga mengusulkan lambang partai dan nama partai.

Adapun tujuan perjuangan partai yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandarkan Pancasila. Partai Gerindra memperoleh 4,46% suara nasional atau dengan jumlah pemilih 4.646.406 dan memperoleh 26 kursi DPR (Berita “Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009”, 10 Mei 2009, dalam [www.Antaraneews.com](http://www.Antaraneews.com)).

#### 4.2.2 Ideologi (Platform) Partai Gerindra

Partai Gerindra merupakan partai politik yang berideologikan nasionalis yang diwujudkan melalui platform dan program politik. Melalui platform yang disebut dengan Manifesto Perjuangan Partai Gerindra dan program politik yang dikenal dengan 8 program aksi untuk kemakmuran rakyat. Dalam perumusan program politik Partai Gerindra ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sedangkan dalam pelaksanaan di tiap-tiap daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Ranting (PR) yang disesuaikan dengan permasalahan di tiap-tiap daerah.

#### 4.2.3 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra	
Ketua Dewan Pembina	Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Ketua Dewan Penasehat	Mayjen TNI (Purn) Dr Haryadi Darmawan
Ketua Dewan Pakar	Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, MA
Ketua Umum	Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Ketua Harian	Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA
Wakil Ketua Harian	Widjono Hardjanto, SH
Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri, Hubungan Antar Partai dan Pemerintahan	Fadli Zon. SS, M.Sc
Ketua Bidang Kajian Sistem Demokrasi	Drs. H. Syahrani Mataja, MM., MBA
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik	Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
Ketua Bidang Kajian Pemilu	Prof. Dr. Syamsul Bahri
Ketua Bidang Kerjasama Antar Partai Politik	Dhohir Farisi
Ketua Bidang Kerjasama Penyelenggara	Abdul Harris Bobihoe

	Pemilu	
	Ketua Bidang Pemerintahan Umum	Dr. H. Azikin Solthan, M.Sc
	Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintahan	Rindoko Dahono Wingit
	Ketua Bidang Otonomi Daerah	Ir. Endro Hermono, MBA
	Ketua Bidang Pembangunan Daerah	H. Subarna, SE., M.Si
	Ketua Bidang Kependudukan	Dr. H.A Rasyid Saleh, M.Si
	Ketua Bidang Pembangunan Masyarakat	Drs. M. Solihat
	Ketua Bidang Pembangunan Desa	H. Bambang Riyanto, SH., MH., M.Si
	Ketua Bidang Kebijakan Keuangan Daerah	H. Dairul, SE., M.Si
	Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri	Mayjen TNI (Purn) Yudi Magio Yusuf
	Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	Irawan Ronodipuro
	Ketua Bidang Hukum dan Perjanjian International	Irmawaty Habie, SH
	Ketua Bidang Kajian Kerjasama Luar Negeri	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc
	Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional	Mayjen TNI (Purn) Chaerawan Nusyirwan
	Ketua Bidang Pertahanan Darat	Kolonel TNI (Purn) Iswandi Anas, M.Si
	Ketua Bidang Pertahanan Laut	Kolonel TNI (Purn) Sutandyo Sudarsono
	Ketua Bidang Pertahanan Udara	Marsda TNI (Purn) Suwitno Adi, SIP
	Ketua Bidang Ketahanan Nasional	Mayjen TNI (Purn) Soenarko
	Ketua Bidang Keamanan Nasional	Komber (Pol) Alfons Loemau
	Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/POLRI	Drs. Wenny Warouw
	Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
	Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dr. Sumarjati Arjoso
	Ketua Bidang Agama Islam	Habib Mahdi Alatas
	Ketua Bidang Agama Kristen	Eliezer H. Hardjo
	Ketua Bidang Agama Katolik	Haposan Paulus Batubara, SH
	Ketua Bidang Agama	Gouw Tjeng Sun

	Budha	
	Ketua Bidang Agama Hindu	Ranjit S. Randhawa
	Ketua Bidang Agama Konghucu	Sanjaya Sutandar
	Ketua Bidang Pendidikan Nasional	Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si
	Ketua Bidang Riset dan Teknologi	Heirma S. Poernomo
	Ketua Bidang Teknologi Terapan	Fadli Tri Hartono, S.Si
	Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Ivan Venri Latif
	Ketua Bidang Kesehatan	Dr. Benyamin Paulus Oktavianus. Sp.P
	Ketua Bidang Perbaikan Gizi Masyarakat	Bondan Haryo Winarno
	Ketua Bidang Keluarga Berencana	Dr. Batara Sirait, Sp. Og
	Ketua Bidang Sosial	Yetti Wulandari
	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	A.S. Kobalen, SE., MBA., M.Phil
	Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Anita Ariyani
	Ketua Bidang Advokasi Perempuan	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
	Ketua Bidang Perlindungan Anak	Dr. Karlina, MARS
	Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel	Retno Sari Widowati
	Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	H. Anda, SE., MM
	Ketua Bidang Kesenian dan Film Nasional	Jamal Mirdad
	Ketua Bidang Budaya Nasional	Helmi Adam, S.Sos., S.Pd
	Ketua Bidang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	Sabam Rajagukguk
	Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan	Fx. Arief Poyuono, SE
	Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil	Roberth Rouw

	Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan	Ir. Iwan Sumule
	Ketua Bidang Pengawasan Buruh dan Ketenagakerjaan	Idin Rosidin
	Ketua Bidang PerlindunganTenaga Kerja	Hairudin, SH
	Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri	Murphy Hutagalung, MBA
	Ketua Bidang Perdagangan	Heri Gunawan
	Ketua Bidang BUMN	H. Nurzahedy Tanjung, SE
	Ketua Bidang Investasi danPasar Modal	Budisatrio Djiwandono
	Ketua Bidang PenerimaanNegara	Ramson Siagian
	Ketua Bidang Keuangan	Haerul Saleh, SH
	Ketua Bidang Perbankan	Drs. H. Mulyadi, MMA
	Ketua Bidang Perindustrian	Mohamad Haekal, MBA
	Ketua Bidang Ekspor danImpor	Khilmi
	Ketua Bidang Kajian EkonomiInternational	Eric Alexander Sugandi
	Wakil Ketua Umum BidangPembangunan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Energi	Edhy Prabowo, MM., MBA
	Ketua Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Ketua Pengendalian PembangunanNasional	Ir. Sumail Abdullah
	Ketua Bidang Tata RuangWilayah	Budi Tjahjono Prawiro
	Ketua Bidang Pertanahan	H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE
	Ketua Bidang PerumahanRakyat	H. Moh. Nizar Zahro, SH
	Ketua Bidang PekerjaanUmum	Sudarsono, ST
	Ketua Bidang Perhubungan	Arion Hutagalung
	Ketua Bidang Pertanian	Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
	Ketua Bidang Peternakan	Drh. Muchlido Apriliast
	Ketua Bidang Kehutanan	Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, MM
	Ketua Bidang Perikanan danKelautan	Ir. Suminta Ismail
	Ketua Bidang PerdaganganAgro Internasional	Dr. Ir Sunggul Sinaga
	Ketua Bidang Pertambangan	Meireza Endipat Wijya, ST
	Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan Hulu	Dr. Ir. Kardaya Wanika, DEA

	Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambahan Hilir	Ir. H. Harry Poernomo
	Ketua Bidang Pemberdayaan dan konservasi Energi	Dian Nugroho, ST
	Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan	Fx. Arief Poyuono, SE
	Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil	Roberth Rouw
	Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Ir. Iwan Sumule
	Ketua Bidang Pengawasan Buruh dan Ketenagakerjaan	Idin Rosidin
	Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	Hairudin, SH
	Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri	Murphy Hutagalung, MBA
	Ketua Bidang Perdagangan	Heri Gunawan
	Ketua Bidang BUMN	H. Nurzahedy Tanjung, SE
	Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal	Budisatrio Djiwandono
	Ketua Bidang Penerimaan Negara	Ramson Siagian
	Ketua Bidang Keuangan	Haerul Saleh, SH
	Ketua Bidang Perbankan	Drs. H. Mulyadi, MMA
	Ketua Bidang Perindustrian	Mohamad Haekal, MBA
	Ketua Bidang Ekspor dan Impor	Khilmi
	Ketua Bidang Kajian Ekonomi Internasional	Eric Alexander Sugandi
	Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Energi	Edhy Prabowo, MM., MBA
	Ketua Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Ketua Pengendalian Pembangunan Nasional	Ir. Sumail Abdullah
	Ketua Bidang Tata Ruang Wilayah	Budi Tjahjono Prawiro
	Ketua Bidang Pertanahan	H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE
	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	H. Moh. Nizar Zahro, SH
	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Sudarsono, ST
	Ketua Bidang Perhubungan	Arion Hutagalung
	Ketua Bidang Pertanian	Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
	Ketua Bidang Peternakan	Drh. Muchlido Apriliast

	Ketua Bidang Kehutanan	Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, MM
	Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan	Ir. Suminta Ismail
	Ketua Bidang Perdagangan Agro Internasional	Dr. Ir Sunggul Sinaga
	Ketua Bidang Pertambangan	Meireza Endipat Wijya, ST
	Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan Hulu	Dr. Ir. Kardaya Wanika, DEA
	Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan Hilir	Ir. H. Harry Poernomo
	Ketua Bidang Pemberdayaan dan konservasi Energi	Dian Nugroho, ST
	Ketua Bidang Kaderisasi	Eko Wibowo
	Ketua Bidang Sekolah Kader	Kharisma Febriansyah
	Ketua Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi Kader	Benny Pangbin
	Ketua Bidang Penguatan Jaringan Kader	Hj. Novita Wijayanti, SE., MM
	Ketua Bidang Informasi Strategis	Danang Wicaksana Sulistya
	Ketua Bidang Komunikasi	Ondy Saputra
	Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik	Dirgayuza Setyawan
	Ketua Bidang Pengelolaan Database Partai	Moh. Arif Widarto
	Ketua Bidang Upacara dan Tradisi Partai	Chusni Mubarok
	Ketua Bidang Logistik Partai	Andani Taufiq, S.Sos
	Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi	Ir. Sufmi Dasko Ahmad, SH., MH
	Ketua Bidang Kajian Hukum	Johan J. Lewerissa, SH., MH
	Ketua Bidang Hak Asasi Manusia	Hj. Mestariany Habie, SH
	Ketua Bidang Advokasi	Habiburokhman, SH
	Ketua Bidang Hukum Perdagangan	Maralda Hernanda Kairupan, SH., LLM., MCI Arb
	Ketua Bidang Hukum Konstitusi	Dr. Hj. Elza Syarief, SH., MH
	Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu	Andi Seto Gadysta Asapa, SH., LLM

Wakil Ketua Umum Bidang Pemudadan Olahraga	Purnomo
Ketua Bidang Kepemudaan	Ikhwan Amirudin, SE., MM
Ketua Bidang Olahraga	Abdul Karim Aljufri
Sekretaris Jenderal	H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum	Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA

**Tabel 4 : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Sumber : [gerindra.or.id](http://gerindra.or.id), diakses 1 November 2022).**

#### 4.2.4 Makna Lambang



**Gambar 6 : Lambang Partai Gerindra (Sumber : [gerindra.or.id](http://gerindra.or.id) diakses pada 1 November 2022).**

Makna Lambang atau Tanda Gambar Partai Gerindra sebagai berikut :

1. Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah.
2. Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran.
3. Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.
4. Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang

berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

5. Di atasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.

#### **4.2.5 Visi dan Misi Partai Gerindra**

Visi Partai Gerindra ialah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi Partai Gerindra ialah :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi

seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.

3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

#### **4.2.6 Asas Partai Gerindra**

Partai Gerindra memiliki asas yang tertuang di dalam AD/ART Partai Gerindra dalam pasal 5 yang berbunyi “Partai Gerindra berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Sumber : gerindra.or.id diakses 1 November 2022).

#### **4.2.7 Tujuan Partai Gerindra**

Partai Gerindra memiliki tujuan yang tertuang dalam AD/ART Partai Gerindra dalam pasal 11 yakni:

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan

konsekuen.

2. Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.
6. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.

#### **4.2.8 Jati Diri dan Watak Partai Gerindra**

Partai Gerindra memiliki jati diri dan watak yang tertuang pada AD/ART Partai Gerindra pasal 7 dan 8 yang berbunyi “Jati diri partai gerindra adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.” Dan Pasal 8 “Watak partai gerindra adalah demokratis,

merdeka, pantang menyerah, berpendidikan”

#### **4.2.9 DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran**

Arti DPC Partai Gerindra ialah Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.

##### **4.2.9.1 Lokasi**

DPC Partai Gerindra berlokasi di :

Jalan : Jl. Kendondong No. 433  
Desa : Penengahan  
Kecamatan : Gedong Tataan  
Kabupaten : Pesawaran.

##### **4.2.9.2 Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran**

Susunan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

Ketua : H. Deswanda, SE., SH  
Sekretaris : Ny. Lenida Putri  
Bendahara : Murni Achmadi  
Penasehat : Ny. Heni, SH.I

#### **4.2.9.3 Tugas Pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran**

DPC Partai Gerindra Kab. Pesawaran berkewajiban :

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
2. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Cabang.
3. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
4. Membentuk dan mengusulkan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.
5. Untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.

### **4.3 Partai Golongan Karya (Golkar)**

Partai Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitas sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini terwujud dengan adanya golongan fungsional. Dari nama ini kemudian diubah dalam Bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya Pada 1959. Hingga kini, Partai Golkar dikenal dalam dunia politik nasional sebagai golkar.

#### **4.3.1 Sejarah Partai Golkar**

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai

berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.

Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4%.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.

#### 4.3.2 Ideologi (Platform) Partai Golkar

Pada tahun 1955 bangsa Indonesia mengukir sejarah dalam praktek demokrasi, dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas dan rahasia (luber). Pada masa tersebut, Indonesia menghadapi berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial maupun politik dengan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pemilu itu, sebanyak 28 partai politik turut serta menjadi kontestan pesta demokrasi tersebut.<sup>47</sup> Setelah berbagai kampanye yang ramai dan melelahkan, akhirnya muncul empat kekuatan partai politik terbesar yang sekaligus keluar sebagai “pemenang”. Partai politik tersebut adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan perolehan suara yang begitu besar jika dibandingkan partai-partai lain semisal Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Murba atau Partai Sosialis Indonesia (PSI) merupakan sebuah hal yang mengejutkan.

Kemenangan PKI ini merupakan ancaman bagi lawan politiknya, baik dari kalangan partai atau pun kelompok lain, khususnya militer.<sup>49</sup> Setelah tahun 1955 tersebut, Indonesia memasuki masa-masa kritis sekaligus menentukan. Hal ini ditandai dengan perdebatan-perdebatan sengit dalam merumuskan dasar negara, dan ketegangan fisik di berbagai daerah yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Hal ini karena sampai tahun 1959 berbagai kelompok yang berdebat di Majelis Konstituante tidak mampu menemukan jalan tengah sebagai suatu kompromi untuk menentukan undang-undang dan dasar negara. Dengan dekrit ini, Presiden membubarkan Majelis Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, dan

mengumumkan bahwa era demokrasi liberal telah berakhir dan saatnya bangsa Indonesia memasuki sebuah masa yang ia namakan sebagai demokrasi yang terkontrol, yaitu Demokrasi Terpimpin.

Salah satu doktrin terkenal dari era ini adalah Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Politik Presiden Soekarno, terlihat cenderung memberi "ruang" yang cukup pada pemenang Pemilu tahun 1955, sehingga iklim politik tersebut menguntungkan PKI untuk mengembangkan kekuatannya. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di pihak militer (AD).<sup>51</sup> Kekhawatiran ini sangat beralasan melihat PKI dengan berbagai organisasi Onderbouw-nya semakin tumbuh besar dan berpengaruh.<sup>52</sup> Dengan berbagai strategi dan taktik mereka mencoba menghalangi perluasan pengaruh PKI. Salah satu strategi yang dilakukan oleh militer adalah membentuk atau mendukung berbagai organisasi tandingan bagi organisasi-organisasi onderbouw PKI sebagai upaya meredam tindakan PKI, yaitu misalnya Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), Gakari (Gerakan Karyawan Republik Indonesia), BPPK (Badan Pembina Potensi Karya), Kosgoro (Koperasi Simpan Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) serta menyponsori terbitnya surat-surat kabar seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.

Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno menjelaskan konsepsinya untuk keluar dari Demokrasi Liberal. Presiden mengajak masyarakat dan elit politik untuk membentuk kabinet "Gotong Royong" yang mengikutsertakan empat partai besar termasuk PKI. Selain itu diperkenalkan badan baru yang dinamakan Dewan Nasional dengan perwakilan buruh, petani, pemuda dan wanita. Bahkan Presiden menyanggupi untuk memimpin dewan ini.<sup>54</sup> Berawal dari konsepsi ini dan didorong persaingannya dengan PKI yang semakin menajam, pada pertengahan 1960-an Jenderal

Nasution dan beberapa orang rekannya membuat suatu rencana untuk membentuk Sekber Golkar, sebuah organisasi yang akan digunakan untuk memelihara kekuatan kelompok anti-komunis.

Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi- organisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.<sup>56</sup> Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 193/1964

Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non- afiliasi berkumpul bersama menanda tangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.<sup>58</sup> Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri.

### 4.3.3 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar

No.	Nama	Jabatan
1.	AIRLANGGA HART ARTO	Ketua Umum
2.	BAMBANG SOESATYO	Wakil Ketua Umum (Madva)
3.	AGUS GUMIWANG KARTASASMIT A	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian)
4.	AZIS SYAMSUDDIN	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan)
5.	KAHAR MUZAKKIR	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidano-Bidano Keoartaian)
6.	H.A.M. NURDIN HALID	Wakil Ketua Umum (Pratama)
7.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan)
8.	AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidano Pemenangan Pemilu)
9.	ROEM KONO	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang dan Sadan Bencana Alam)
10.	RIZAL MALLARANGENG	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidang Penggulangan Strateqls)
11.	HETIFAH SJAIFUDIAN	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat)
12.	NURUL ARIFIN	Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang-Bidang Komunikasi dan Informasi)
13.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN	Ketua Bidang Organisasi
14.	VENNO TETELEPTA	Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
15.	M. SABIL RACHMAN	Ketua Bidang Hubungan Ormas
16.	M. YAHYAZAINI	Ketua Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah
17.	IDRIS LAENA	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riaudan Kepri
18.	BOBBY ADHITYO RIZALDI	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung
19.	M.Q. ISWARA	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah OKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
20.	M. IQBAL WIBISONO	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Tengah dan 0.1. Yogyakarta

21.	MUHAMMAD SARMUJI K	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah 'j Jawa Timur
22.	BAMBANG HERi PURNAMA	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan
23.	MUHIDIN M. SAID	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi
24.	GOE SUMARJAYA LINGGIH	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB dan NTT
25.	HAMZAH SANGADJI	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Maluku Utara
26.	KLEMEN TINAL	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua dan Papua Barat
27.	TAHAN SAMUEL LUMBAN TORUAN	Ketua Bidang Pertahanan
28.	ANDOGO WIRADI	Ketua Bidang Keamanan Nasional
29.	DAVE AKBARSYAH FIKARNO	Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri
30.	ADIES KADIR	Ketua Bidang Hukum
31.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI	Ketua Bidang Hak Asasi Manusia
32.	NUSRON WAHID	Ketua Bidang Koperasi dan UKM
33.	ALEXANDER ERY WIBOWO	Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
34.	ROBERT J. KARDINAL	Ketua Bidang Pertanahan dan Reformasi Agraria
35.	DEDI MULYADI	Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan
36.	LAMHOT SINAGA	Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan
37.	MUKHAMAD MISBAKHUN	Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal
38.	ERWINAKSA	Ketua Bidang Industri
39.	JERRY SAMBUAGA	Ketua Bidang Perdagangan
40.	GATOT SUDARIYONO	Ketua Bidang Tenaga Kerja
41.	KUSUMA JUDILEKSONO	Ketua Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur
42.	RAVINDRA AIRLANGGA	Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
43.	TB. ACE HASAN SYADZILY	Ketua Bidang Kerohanian

44.	AGUSTIAN B. PRASETYA	Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
45.	PANGGAH SUSANTO	Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
46.	ILHAM PERMANA	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
47.	AIRIN RACHMI DAINY	Ketua Bidang Perempuan
48.	BUDHY SETIAWAN	Ketua Bidang Tani dan Nelayan
49.	FIRMAN SOEBAGYO	Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik
50.	KHOLIS MALIK	Ketua Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan
51.	MEUTYA V. HAFID	Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini
52.	MUKHTARUDIN	Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial
53.	LODEWIJK F. PAULUS	Sekretaris Jenderal
54.	EKO WIRATMOKO	Wakil Sekretaris Jenderal
55.	MUSTAFA M. RADJA	Wakil Sekretaris Jenderal
56.	TARDJO RAGIL	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi
57.	DWI PRIYOATMOJO	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
58.	TUMPAL SAHALA P. SIANIPAR	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Orm as
59.	RIYONO ASNAN	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah
60.	HASRUL BENNY HARAHAP	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri
61.	DONI AKBAR	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kep. Bangka Belitung
62.	ANDIKA HAZRUMY	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah OKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
63.	DICO M. GANINDUTO	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta

64.	MISBAH SHOIM HARIS	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Jawa Timur
65.	M.PAHLEVIPANGERANG	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Kalimantan
66.	ADRIAN JOPIE PARUNTU	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Sulawesi
67.	HERMAN HAYONG	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Bali, NTB dan NTT
68.	EDI LANGKARA	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Maluku dan Maluku Utara
69.	BERNARD SAGRIM	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang PP Wilayah Papua dan Papua Barat
70.	RUDY MAS'UD	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan
71.	SYAMSUL HIDAYAT	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Keamanan
72.	CHANDRI M. PUSPITASARI	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Luar Negeri
73.	CHRISTINA ARIYANI	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM
74.	DEREK LOUPATY	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Koperasi dan UKM
75.	SEBASTIAN SALANG	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
76.	AGUNG WIDYANTORO	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Agraria, Pertanian dan Perkebunan
77.	ANDI BUDI SULISTYO	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Perikanan dan Kelautan
78.	PUTERI ANETTA KOMARUDIN	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan dan Pasar Modal
79.	RUSLI NUR ALI AZIZ	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Industri dan Perdagangan
80.	AMIN NGABALIN	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Tenaga Kerja, Tani dan Nelayan
81.	JAN PIETER PANGARIBUAN	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur
82.	HASRUL RAHMAN	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
83.	SHOLAHUL AM NOTOBUWONO	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerohanian
84.	SEKARWATI	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang

		Pendidikan dan Kebudayaan
85.	EVA WIBISONO	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
86.	M. ALEXANDRA PAHLEVI _	Wakil Sekctaris Jenderal Bidang Pemuda dan Olah raga
87.	LINSEY AFSARI PUTR	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Perempuan
88.	FAHD EL FOUZ ARAFIQ	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Lembaga
89.	PUTRI ZIZI PUPUT NOVEL	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini
90.	SAHATUA SIMANJUNTAK	Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Bencana Alam dan Sosial
91.	DITO GANINDUTO	Bendahara Umum
92.	AGOE SILABAN	Wakil Bendahara Umum
93.	SHINTA WIJAYA KAMDANI	Wakil Bendahara Umum
94.	SARI YULIATI	Wakil Bendahara Umum
95.	SALIM FAKHRY	Wakil Bendahara Umum
96.	J. DWI HARTANTO	Wakil Bendahara Umum
97.	HERU DEWANTO	Wakil Bendahara Umum
98.	DEWIASMARA	Wakil Bendahara Umum
99.	JOHN KENEDY AZIS	Wakil Bendahara Umum
100.	HANAN A. ROZAK	Wakil Bendahara Umum
101.	BADRUTTAMAM	Wakil Bendahara Umum
102.	SYAFAAT PERDANA	Wakil Bendahara Umum
103.	KARAN SUKARNO W.	Wakil Bendahara Umum
104.	HARIARA TAMBUNAN	Wakil Bendahara Umum
105.	RAYMOND SYAUTA	Wakil Bendahara Umum
106.	HERNA DWI KUSUMAWATI	Wakil Bendahara Umum
107.	MEDINA WIRANATAKUSUMAH	Wakil Bendahara Umum
108.	RINA DWI ANDINI	Wakil Bendahara Umu
109.	ADANTY KURNIA	Wakil Bendahara Umum

110.	JOSEF NAE SOI	Wakil- Bendahara Umum
111.	DADAN PAHLAWAN S.	Wakil Bendahara Umum
112.	FIRALDI AKBAR	Wakil Bendahara Umum
113.	DIAH RORO ESTY	Wakil Bendahara Umum
114.	JUNAIDI ELVIS	Wakil Bendahara Umum
115.	AHMAD NASIR SIREGAR	Departemen Organisasi
116.	DIA RAMAYANA	Departemen Organisasi
117.	DENI YUSUF	Departemen Organisas
118.	WENDHY TUSWANDI	Departemen Kaderisasi dan Keanggotaan
119.	ANDI MARAIDA	Departemen Kaderisasi dan Keanggotaan
120.	ASTRID KRISANDA	Departemen Kaderisasi dan Keanggotaan
121.	ANDI SYAMSUL BAKHRI TANRI	Departemen Hubungan Ormas
122.	MIRANTI KONO	Departemen Hubungan Ormas
123.	MAHALINDA NAPITUPULU	Departemen Hubungan Ormas
124.	MUHAMMAD FAUZI	Departemen Otonomi dan Pemerintahan Daerah
125.	RIA SRI WOELANDARI	Departemen Otonomi dan Pemerintahan Daerah
126.	MARDIYANTI ADNAN AKSA	Departemen Otonomi dan Pemerintahan Daerah
127.	IMRAN CHATIB	Departemen Pemenangan Pemilu Sumatera 1
128.	ROBI ANUGRAH MARPAUNG	Departemen Pemenangan Pemilu Sumatera 1
129.	CUT RIZKA SEPTIANI	Departemen Pemenangan Pemilu Sumatera 1
130.	SANIATUL LATIFAH	Departemen Pemenangan Pemilu Sumatera 2
131.	RADIANTO STAR	Departemen Pemenangan Pemilu Sumatera 2
132.	YUDHA NOVANZAH UTAMA	Departemen Pemenangan Pemilu Sumatera 2
133.	GALIH KARTASASMITA	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 1

134.	SITI AISYAH	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 1
135.	MUHAMMAD SAYIDI	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 1
136.	MUHAMMAD OMAR SYARIF	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 2
137.	KUNTOMO	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 2
138.	YOVITA LASTI HANDINI	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 2
139.	ADI WIBOWO	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 3
140.	AHMAD IRAWAN	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 3
141.	YULI ANDRIYANI	Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 3
142.	ARYA RIZKI DARSONO	Departemen Pemenangan Pemilu Kalimantan
143.	ADRIANUS ASIA SIDOT	Departemen Pemenangan Pemilu Kalimantan .
144.	DEBBY EMILIA	Departemen Pemenangan Pemilu Kalimantan
145.	JAMALUDDIN SYAMSIR	Departemen Pemenangan Pemilu Sulawesi
146.	MUHAMMAD BALYA	Departemen Pemenangan Pemilu Sulawesi
147.	SUCIANTI SUAIB SAENONG	Departemen Pemenangan Pemilu Sulawesi
148.	ABDUL HAFID BASO	Departemen Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT
149.	MU HAMAD LUTFI	Departemen Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT
150.	IPUTUYUDASUPARSANA	Departemen Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT
151.	HELMI DJEN	Departemen Pemenangan Pemilu Maluku, Maluku Utara
152.	AYUB LESSY	Departemen Pemenangan Pemilu Maluku, Maluku Utara
153.	ARMAN ALWI	Departemen Pemenangan Pemilu Maluku, Maluku Utara
154.	TRIVENA TINAL	Departemen Pemenangan Pemilu

		Papua, Papua Barat
155.	MARTINUS A. WERIMON	Departemen Pemenangan Pemilu Papua, Papua Barat
156.	STEVEN ABRAHAM	Departemen Pemenangan Pemilu Papua, Papua Barat
157.	KIKI OTTO KURNIAWAN	Departemen Pertahanan
158.	IRENE RATNA KARTIKASAPTI	Departemen Pertahanan
159.	TONI APRILIANI	Departemen Pertahanan
160.	YEFTA MBOLIK	Departemen Keamanan Nasional
161.	HARIS PERTAMA	Departemen Keamanan Nasional
162.	NOFEL SALEH HILABI	Departemen Keamanan Nasional
163.	ORIN AULIA RAHMAN	Departemen Hubungan Luar Negeri
164.	ARYA A. PRATAMA KUNTADI	Departemen Hubungan Luar Negeri
165.	JESICA NATALIA WIDJAJA	Departemen Hubungan Luar Negeri
166.	MUHAMMAD SATU PALI	Departemen Hukum
167.	GIOFEDI	Departemen Hukum ...
168.	FETTY ANGGRAENIDINI	Departemen Hukum
169.	MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR	Departemen Hak Asasi Manusia
170.	ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO	Departemen Hak Asasi Manusia
171.	DEWI SARTIKA	Departemen Hak Asasi Manusia
172.	IZHARI MAWARDI	Departemen Keuangan dan Pasar Modal
173.	FITRIA YUSUF HAMKA	Departemen Keuangan dan Pasar Modal
174.	ASTRI REGINA KAMILA HATTA	Departemen Keuangan dan Pasar Modal
175.	ROBY KURNIAWAN	Departemen Industri
176.	SAFIRA NADIA	Departemen Industri
177.	TIARA WULAN JULI	Departemen Industri
178.	GAVRIL PUTRANTO NOVANTO	Departemen Perdagangan
179.	RINI RAHMADHANI	Departemen Perdagangan
180.	IDAH SAHIDAH	Departemen Perdagangan
181.	SELINA GITA	Departemen Wasbang, Pembangunan

		Infrastruktur
182.	KEMAS ILHAM AKBAR	Departemen Wasbang, Pembangunan Infrastruktur
183.	YAYA DWI SETYA	Departemen Wasbang, Pembangunan Infrastruktur
184.	ACHMAD BAKRI PUTRA	Departemen Koperasi dan U KM
185.	HELMAN SIMANJUNTAK	Departemen Koperasi dan UKM
186.	TANIA LAENA	Departemen Koperasi dan U KM
187.	ROBERTTAMPUBOLON	Departemen Energi dan Sumber Daya Alam
188.	FAHMAN HABIBIE	Departemen Energi dan Sumber Daya Alam
189.	HILDA KUSUMADEWI	Departemen Energi dan Sumber Daya Alam
190.	DOODY IMRON CHOLID	Departemen Agraria, Pertanian dan Perkebunan
191.	ARIF BUDI PRAKOSO	Departemen Agraria,-Pertanian dan Perkebunan
192.	ANGELIA DIAN PERMATA DA SILVA	Departemen Agraria, Pertanian dan Perkebunan
193.	I DEWA WIDIYASA NIDA	Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
194.	NURIKA SARI	Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
195.	DIANA WIDIASTUTI	Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
196.	SITI MARHAMAH	Departemen Kerohanian
197.	TON ABDILLAH HAS	Departemen Kerohanian
198.	KHAIDAR R. HIDAYATULLAH	Departemen Kerohanian
199.	FITRI KRISNAWATI	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
200.	AMIRAH KACA	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
201.	ABDUL RAHMAN	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
202.	ROOSDINAL SALIM	Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup
203.	GENESIA WULANDARI S.	Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup

204.	DENNY YUNIANDARI	Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup
205.	AHMAD ANDI BAHRI	Departemen Pemuda dan Olahraga
206.	HARTINI SORAYA	Departemen Pemuda dan Olahraga
207.	ALIA LAKSONO	Departemen Pemuda dan Olahraga
208.	ERNAWATI TAHANG	Departemen Perempuan
209.	TATI NOVIATI	Departemen Perempuan
210.		

**Tabel 5 : Susunan Kepengurusan Partai Golongan Karya (sumber : [www.partaigolkar.com](http://www.partaigolkar.com)).**

#### 4.3.4 Makna Lambang



**Gambar 7 : Logo Partai Golongan Karya (Sumber : [www.golkar.com](http://www.golkar.com))**

Makna Lambang Partai Golkar berupa pohon beringin yang dikelilingi untaian padi dan kapas dalam perisai segi lima, dengan pita beruliskan GOLONGAN KARYA di bagian bawahnya.

1. Pohon beringin bermakna melindungi yang berarti Partai Golkar memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia.
2. Padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia.
3. Perisai segi lima melambangkan ideologi partai, yakni Pancasila

4. Warna dasar kuning bermakna kejayaan.
5. 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

#### **4.3.5 Visi dan Misi Partai Golkar**

Partai Golkar memiliki visi dan misi yang digambarkan dalam perjuangan partai. Visi Partai Golkar yakni Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Misi Partai Golkar antara lain:

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

#### **4.3.6 Asas Partai Golkar**

Berdasarkan AD ART Partai Golkar memiliki asas yang tertuang dalam pasal 5 yakni Partai Golkar berasaskan Pancasila

#### **4.3.7 Tujuan Partai Golkar**

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

#### **4.3.8 DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran**

DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran ialah yang berwenang dalam menentukan kebijakan tingkat kabupaten sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat, baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar. Kemudian wewang yang selanjutnya ialah mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran. Wewenang yang selanjutnya ialah mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan kecamatan. Dan wewenang yang terakhir ialah menyelesaikan perselisihan kepengurusan pimpinan kecamatan.

DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran selain memiliki wewenangnya juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi yakni melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat, baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, serta peraturan organisasi Partai Golkar. Dan berkewajiban memberikan pertanggung jawaban pada musyawarah daerah kabupaten/kota.

#### **4.3.8.1 Lokasi**

DPD Partai Golkar Kab. Pesawaran berlokasi di :

Jalan : Jl. Raya Kedondong  
Dusun : Way Suka Marga  
Desa : Pringsewu Utara  
Kecamatan : Kedondong  
Kabupaten : Pesawaran

#### **4.3.8.2 Kepengurusan DPC Partai Golkar Kabupaten Pesawaran**

Struktur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

1. Ketua
2. Wakil-Wakil Ketua Bidang
3. Sekretaris
4. Wakil-Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil-Wakil Bendahara
7. Bagian-Bagian

#### **4.3.8.3 Tugas Pokok Kepengurusan DPC Kabupaten Pesawaran**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional

#### **4.3.8.4 Rencana Program Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Pesawaran**

Pesawaran-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pesawaran melakukan konsolidasi internal di tingkat kecamatan menyongsong Pemilu 2024, sekaligus menyambut bulan suci ramadhan 1443 Hijriyah. Kegiatan diawali silaturahmi bersama pengurus tingkat Kecamatan Teluk Pandan dan pengurus desa bertempat di Pantai Mutun, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Sabtu (26/03/2022) Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, Bambang Suheri menyampaikan, kegiatan ini, selain konsolidasi, juga menjalin kebersamaan di tingkat bawah seperti kegiatan ini.

#### **4.3.8.5 Gambaran Umum tentang Proses Rekrutmen**

Mekanisme rekrutmen oleh Partai Golkar telah dilakukan sesuai dengan AD/ART Partai yang bersifat terbuka dan tertutup. Pada rekrutmen terbuka, Partai Golkar membuka rekrutmen seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota Partai Golkar dan menjadi bakal calon bupati dan wakil Bupati dari Partai Golkar sepanjang bersedia mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Partai Golkar. Dalam rekrutmen Bupati dan Wakil Bupati.

## VI. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini antara lain :

#### 6.1.1 Penerapan Transparansi pada Rekrutmen Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.

Rekrutmen calon bupati dan wakil bupati PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar Kabupaten Pesawaran telah menerapkan transparansi dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Bahwa partai telah memberikan beberapa informasi. Informasi yang disampaikan partai antara lain informasi dimulainya proses rekrutmen, informasi persyaratan pendaftaran dan informasi proses pendaftaran Calon tetapi beberapa partai hanya memberikan informasi secara normatif saja. Partai memiliki mekanisme dalam pengaduan untuk masyarakat. Mekanisme tersebut dapat berupa bidang kerakyatan yang secara khusus menangani keluhan masyarakat.

Bahwa partai melakukan tranparansi kepada masyarakat luas melalui media baik turun langsung maupun tidak. Tetapi belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan umumnya parpol di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis. Meskipun ada

prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya dalam implementasikan oleh pimpinan parpol.

### **6.1.2 Asas Kredibilitas, Integritas dan Akuntabilitas pada Proses Rekrutmen Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI-Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar**

Penggunaan media menjadi alat untuk meningkatkan kredibilitas partai. Komunikasi pada ketiga partai merupakan pertimbangan yang penting untuk memastikan cukup interaksi dalam *platform* media sosial. Telah memainkan peran penting dalam kampanye politik pada tahun 2020. Sesuai penjelasan pada pembahasan maka partai politik sudah melaksanakan asas kredibilitas yakni kualitas dan kapabilitas partai sudah membentuk kepercayaan kepada rakyat.

Asas integritas menekankan pada konsisten moral, keutuhan pribadi atau kejujuran (Jacobs, 2004). Partai politik merupakan sarana bagi masyarakat dalam melatih kader-kader dan memberikan pendidikan politik untuk mencari bibit-bibit pemimpin dimasa depan yang memiliki integritas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Partai politik PDI-Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar sudah membentuk pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku dan dihasilkan melalui proses panjang.

Lukito menjelaskan tentang asas akuntabilitas yakni kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Dari arti tersebut partai politik berkewajiban dan

memiliki tanggung jawab kepada publik dalam penentuan rekrutmen calon kepala daerah kepada masyarakat. Dari hasil yang didapat bahwa dari ketiga partai sudah melaksanakan asas akuntabilitas.

## **6.2 Saran**

Berangkat dari kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah.

- 6.2.1** Merbangun sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan umummnya parpol di Indonesia. Partai tidak boleh mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri, sehingga tidak cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis.
  
- 6.2.2** Partai harus menerapkan sepenuhnya asas kredibilitas, integritas dan akuntabilitas. Masih perlu adanya evaluasi bagi partai dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah harus menerapkan atau harus sesuai dengan asas kredibilitas, integritas dan akuntabilitas partai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Semarang
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Rush, M., & Althoff, P. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rahman, Meutiah Ganie. 2000. “*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*” dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Emmy Hafild. 2008. *Laporan Studi : Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Cetakan Kedua, Transparency International Indonesia dan IFES. Jakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Romli, Lily. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Lipi. Jakarta.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia*. Perum Griya. Saka Permai. Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, “Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004”* PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.

- Putra, Fadilah. 2002. *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*,: CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Halking dan Budi Ali Mukmin. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Negeri Medan. Medan.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Masyuri dan Zainudin, M. 2011. *Metodelogi Penelitaian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Refika Aditama. Bandung
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan Kualitas*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

#### **Dokumen :**

- Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Publik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tentang Partai Politik
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri. 2002
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

### **Jurnal dan Skripsi :**

- Permadi, B., dan Riharjo, I.B. .2015. *Pandangan pengurus partai terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan partai politik.* Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 7, 3-6.
- Liliy Romli. 2005. *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3, hal 19.
- Asrida. (2012). *Pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bireuen.* Jurnal Kebangsaan, Vol. 1, No. 1, 31-35.
- Rahmawati, E.N. 2014. *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara).* Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung. Lampung.

### **Website :**

- Jayani, Dwi Hajya. 2019. Gubernur dan Wali Kota/Bupati yang Terjerat Korupsi oleh KPK.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi>. Diakses pada 11 Desember 2019.
- Aprialdo. 2019. 5 Kepala Daerah di Lampung yang Dijerat KPK.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/05564091/5-kepala-daerah-di-lampung-yang-dijerat-kpk?page=all>. Diakses pada 18 Desember 2019.
- Teras Lampung. 2019. <https://www.teraslampung.com/ini-45-caleg-dprd-pesawaran-yang-meraih-kursi-pada-pemilu-2019/>. Diakses pada 17 juni2020.
- Saputra, Fajar Emir. 2019. PDI Perjuangan Pesawaran Buka Pendaftaran Pilkada2020 <https://lampung.antaranews.com/berita/355468/pdi-perjuangan-pesawaran-buka-pendaftaran-pilkada-2020>. Diakses pada 18 Desember 2019.
- Redaksi. 2019. Pilkada 2020, Golkar Pesawaran Segera Laksanakan Penjaringan <https://netizenku.com/pilkada-2020-golkar-pesawaran-segera-laksanakan-penjaringan/>. Diakses pada 18 Desember 2019.

Rohman Taufik. 2020. Gerindra Jalin Komunikasi Calonkada  
<http://lampung.rilis.id/gerindra-jalin-komunikasi-calonkada>. Diakses  
pada 20 Desember 2019

Tamtomo, Akbar Bhayu. Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2019  
Versi KPU.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/16141831/infografik-perolehan-suara-partai-politik-dalam-pemilu-2019-versi-kpu>. Diakses  
pada 23 Desember 2019.